



Katalog BPS: 2302004



# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA NOVEMBER 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK**



Katalog BPS: 2302004



# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA NOVEMBER 2013



# **Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia November 2013**

ISSN. 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1401

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: xvi + 104 halaman

Naskah: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

## KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan *series Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus), dan Triwulan IV (November) tahun 2013. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, Februari 2014  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Republik Indonesia

**Dr. Suryamin**  
**NIP. 19560805 197903 1 001**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim) .....	xi
Ringkasan Eksekutif .....	xiii
1. Pendahuluan .....	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan .....	1
1.2. Sakernas dan KILM .....	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan .....	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM .....	6
2. Penjelasan Teknis .....	9
2.1. Penjelasan Umum .....	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja .....	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja .....	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja .....	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Setengah Pengangguran ( <i>Underemployment</i> ), dan Ketidakaktifan .....	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf .....	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja .....	22
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja .....	22
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja .....	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan .....	23
3. Partisipasi dalam Dunia Kerja (KILM 1) .....	25
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7) .....	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk ( <i>Employment to Population Ratio-EPR</i> ) .....	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .....	33
4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha .....	37

4.4.	KILM 5. Pekerja Paruh Waktu .....	41
4.5.	KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja .....	45
4.6.	KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal .....	49
5.	Indikator Pengangguran .....	53
5.1.	KILM 8. Pengangguran .....	53
5.2.	KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda .....	56
5.3.	KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan .....	59
5.4.	KILM 12. Setengah Penganggur ( <i>Underemployment</i> ) .....	64
5.5.	KILM 13. Tingkat Ketidaktifan .....	68
6.	Indikator Pendidikan dan Melek Huruf .....	71
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf .....	71
	LAMPIRAN .....	75



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2013 .....	26
Tabel 2.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013 .....	30
Tabel 3.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013 .....	31
Tabel 4.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta) .....	34
Tabel 5.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 .....	35
Tabel 6.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta) .....	38
Tabel 7.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 .....	39
Tabel 8.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2013 (persen) .....	42
Tabel 9.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013 .....	46
Tabel 10.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013 (dalam juta) .....	50
Tabel 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013 .....	50
Tabel 12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2013 (persen) .....	53
Tabel 13.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013 .....	57
Tabel 14.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 (persen) .....	60
Tabel 15.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 .....	62
Tabel 16.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2013 (dalam juta) .....	64
Tabel 17.	Indikator Setengah Penganggur, 2013 .....	65
Tabel 18.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 .....	67
Tabel 19.	Indikator Ketidakaktifan, 2013 .....	68
Tabel 20.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 .....	72

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Agustus dan November 2013 (persen) .....	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 (persen) .....	28
Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Agustus dan November 2013 .....	32
Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 .....	32
Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 .....	36
Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus dan November 2013 .....	40
Grafik 7. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 (persen) .....	43
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 (persen) .....	44
Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, November 2013 .....	48
Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Agustus dan November 2013 .....	52
Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, November 2013 .....	52
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 (persen) .....	54
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, November 2013 .....	63
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus dan November 2013 .....	66
Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus dan November 2013 (persen) .....	70
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Agustus dan November 2013 .....	73
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, November 2013 .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam ribu).....	77
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013 (dalam juta).....	78
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam ribu).....	79
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2013 (dalam juta).....	80
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (persen).....	81
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam ribu).....	82
Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013.....	83
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013.....	84
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013.....	86
Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013.....	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013 .....	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013.....	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (persen).....	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 (persen).....	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 .....	94
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 ..	95

---

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, 2013 (dalam ribu).....	96
Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (persen).....	97
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 .....	98
Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2013 (rupiah) .....	99
Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2013 (rupiah) .....	100
Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (rupiah).....	101
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2013 (rupiah).....	102
Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama .....	103

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas November 2013 mencapai 122,62 juta orang, secara absolut naik sebanyak 4,43 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 (118,19 juta orang) dan naik sebanyak 0,96 juta orang dibandingkan keadaan Mei 2013 (121,66 juta orang).

Secara nasional, angka EPR pada November 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan Agustus 2013, yaitu meningkat 2,47 poin dari angka 62,72 menjadi 65,19 pada November 2013 ini. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada November 2013. Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, EPR November 2013 justru mengalami penurunan meskipun kecil, yaitu sebesar 0,04 poin dari angka 65,23.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada November 2013 ini polanya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan periode sebelumnya (Agustus 2013). Persentase terbesar diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha, yang meningkat tipis sebesar 0,05 persen poin dari 47,07 persen menjadi 47,12 persen. Persentase terbesar berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/ pegawai yang

naik tipis sebesar 0,07 persen poin dari 37,03 persen menjadi 37,10 persen. Hanya penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga yang mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dari 15,90 persen menjadi 15,78 persen.

Hasil Sakernas November 2013 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,21 persen, urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 34,19 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 21,60 persen.

Pada November 2013, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,63 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan sebesar 0,76 persen poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 (23,39 persen), namun mengalami kenaikan sebesar 3,02 persen jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 (19,61 persen). Hasil Sakernas November 2013 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 33,69 persen dan 15,82 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada November 2013 mencapai 33,04 persen atau mengalami penurunan sebesar 6,45 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2013 (39,49 persen), namun mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin bila dibandingkan dengan Mei 2013 (32,62 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013 menunjukkan bahwa dari 115,55 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,31 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (61,60 juta orang). Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Mei 2013 sebesar 53,56 persen, turun menjadi 52,58 persen pada Agustus 2013, dan kembali naik pada November 2013 menjadi 53,31 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Mei 2013 mencapai 46,44 persen, naik menjadi 47,42 persen pada Agustus 2013, dan turun pada November 2013 hingga mencapai 46,69 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013, TPT di Indonesia cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus maupun Mei 2013. TPT pada November 2013 sebesar 5,77 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori

penganggur. TPT pada November 2013 mengalami penurunan sebesar 0,48 persen poin bila dibandingkan Agustus 2013 (6,25 persen), dan turun sebesar 0,04 persen poin dibandingkan Mei 2013 (5,81 persen).

TPT penduduk pada kelompok umur muda berdasarkan hasil Sakernas November 2013 mencapai 19,35 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 19 orang yang menganggur. Angka tersebut turun sebesar 2,29 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2013 (21,64 persen) atau naik sebesar 1,33 persen poin bila dibandingkan Mei 2013 (18,02 persen).

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas November 2013, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,65 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,84 persen.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas November 2013, mencapai 9,88 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 6,10 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,78 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada November 2013, jumlah setengah penganggur di daerah



perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,61 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,27 juta orang.

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas November 2013 mencapai 30,81 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,81 persen.

Hasil Sakernas Mei, Agustus dan November 2013 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, tingkat ketidakaktifan pada November 2013 mengalami penurunan sebesar 2,29 persen poin, namun jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 naik sebesar 0,07 persen poin. Seiring penurunan tingkat ketidakaktifan (Sakernas Agustus– November 2013) juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja, yaitu sebanyak 3,86 juta orang dari 58,47 juta orang pada Agustus 2013 menjadi 54,61 juta orang pada November 2013.

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Agustus 2013. Angkatan kerja pada November 2013 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 59,56 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,25 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 10,01 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,18 persen.



## 1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, sejak Triwulan

I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

### 1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan,

tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu; bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan

Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011–November 2013, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

## 1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, SUPAS dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

### 1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

### 2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

### 3) Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 final yang diproyeksikan ke bulan November 2013.

### 4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

### 5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/sederhana, mudah

dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

#### 6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja

(KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

### 1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi

pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak"

untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

## 2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang

produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

## 3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

## 4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era

globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

#### 1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak

aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan,



misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisa apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat

terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja

dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<http://www.bps.go.id>

## 2. PENJELASAN TEKNIS

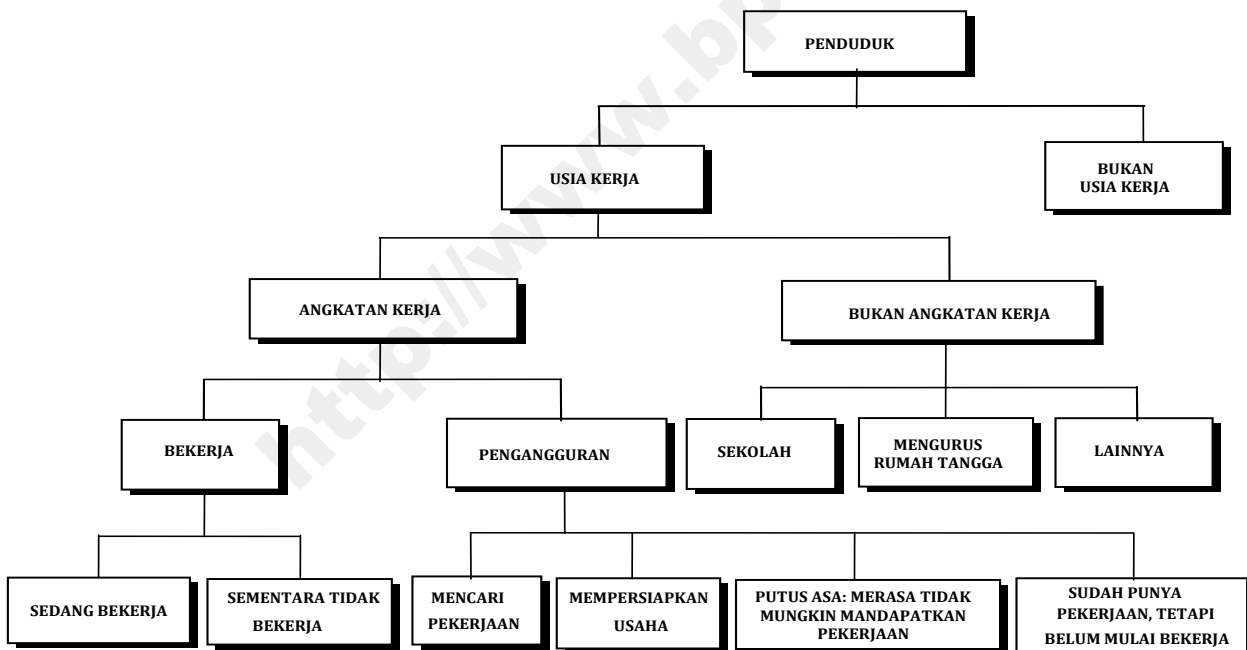
Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

### 2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang

dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10

tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumur,

dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, baik telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut

digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung

dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

## 2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran),

- KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
  5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
  6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
  7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
  8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

### 2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

#### **KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6<sup>th</sup> ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun keatas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

## 2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

### **KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)**

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk

alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

### **KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:



1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
  - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
  - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
  - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan

nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

#### **KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

#### **KILM 5. Pekerja Paruh Waktu**

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan

pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador<sup>1)</sup>. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

#### **KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja**

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam keatas, sebagaimana data yang tersedia.

#### **KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal**

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan

---

<sup>1)</sup> Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

Konferensi Internasional Stasisi Tenaga Kerja ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak

tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan<sup>2)</sup>.

---

<sup>2)</sup> Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

### 2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (UNDEREMPLOYMENT), DAN KETIDAKAKTIFAN

#### KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif<sup>3)</sup>. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak

<sup>3)</sup> Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang diperoleh dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

#### **KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda**

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada

kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

#### **KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang**

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

#### **KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan**

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika

diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

#### **KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)**

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
  - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;

- b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.

- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

#### **KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan**

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga

perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada

wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

#### 2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

##### **KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf**

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun<sup>4</sup>), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

## 2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

### **KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur**

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

### **KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan**

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh

karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

### **KILM 17. Upah per Jam**

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

## 2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

### **KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian

sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.



## 2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

### **KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja**

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan

ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

## 2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

### **KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan**

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga

memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.



### 3.PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

#### KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas November 2013 mencapai 122,62 juta orang, secara absolut naik sebanyak 4,43 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 (118,19 juta orang) dan naik sebanyak 0,96 juta orang dibandingkan keadaan Mei 2013 (121,66 juta orang), lihat Lampiran 3.

Persentase TPAK mengalami kenaikan dari 66,90 persen pada Agustus 2013 menjadi 69,19 persen pada November 2013, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada November 2013 naik sebesar 2,29 persen poin. Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, TPAK November 2013 menurun sebesar 0,07 persen poin.

Pada umumnya TPAK laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Sebagai gambaran pada November 2013, TPAK laki-laki mencapai 85,49 persen sementara pada perempuan hanya 52,93 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 85 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja hanya sebanyak 53 orang yang termasuk angkatan kerja. Pada periode Agustus 2013–November 2013, TPAK

laki-laki naik 1,91 persen poin dan TPAK perempuan juga naik 2,65 persen poin. Pola yang sama juga terjadi pada periode Mei 2013–November 2013, dimana TPAK untuk laki-laki naik tipis sebesar 0,18 persen poin sedangkan TPAK perempuan menurun sebesar 0,33 persen poin.

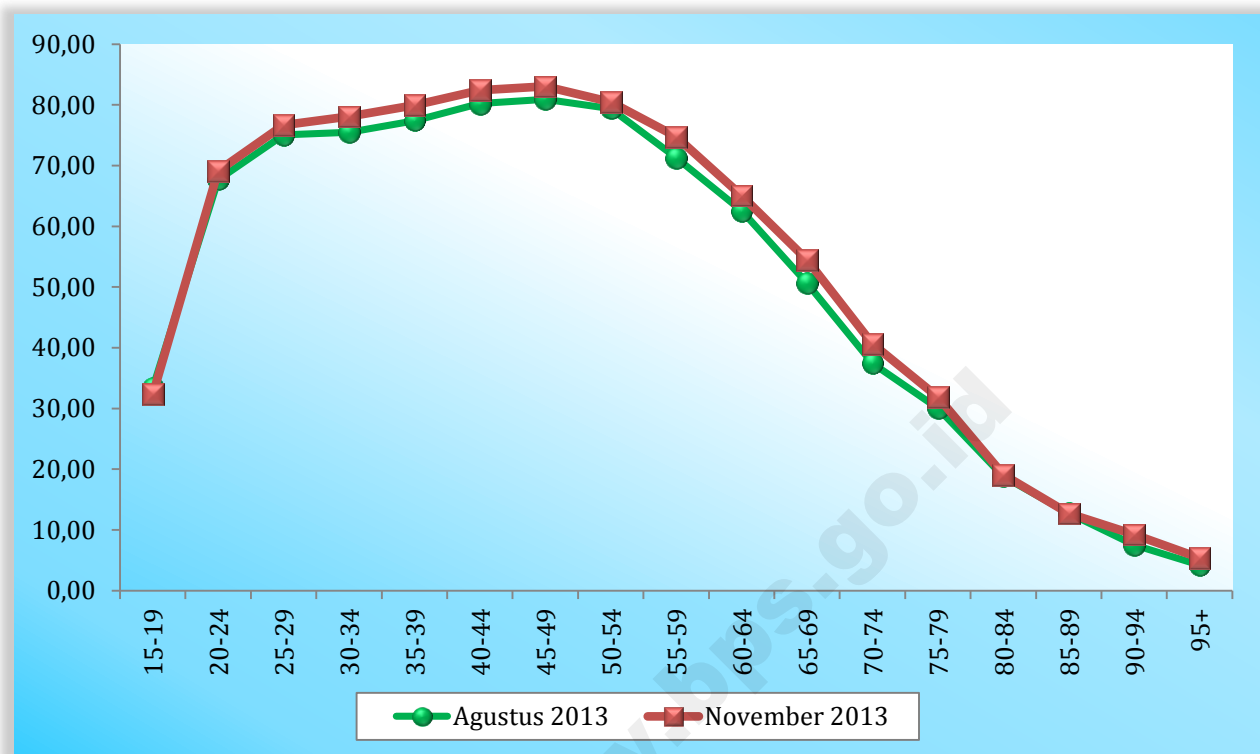
Pada periode Agustus 2013–November 2013, persentase TPAK mengalami peningkatan pada semua kelompok umur (Tabel 1). Untuk kelompok umur yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah kelompok umur 55–64 tahun, yang naik sebesar 3,00 persen poin. Pola yang berbeda terjadi pada periode Mei–November 2013, dimana peningkatan persentase terbesar terjadi pada kelompok umur 15–24 tahun (0,80 persen poin) dan penurunan TPAK terbesar terjadi pada kelompok umur 35–54 tahun (0,61 persen poin).

Grafik 1 menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur 5 tahunan, pada umumnya keadaan TPAK pada November 2013 lebih tinggi dibanding keadaan Agustus 2013, hanya pada kelompok umur 80–84 tahun dan 85–89 tahun saja TPAK terlihat hampir berhimpitan. Jarak atau pergeseran grafik yang paling mencolok berada pada kelompok umur 65–69 tahun.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2013  
(persen)

Kelompok Umur	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>69,26</b>	<b>66,90</b>	<b>69,19</b>
Laki-laki	85,31	83,58	85,49
Perempuan	53,26	50,28	52,93
Perkotaan	67,38	64,44	67,57
Perdesaan	71,21	69,45	70,86
<b>(15–24)</b>	<b>49,49</b>	<b>48,27</b>	<b>50,29</b>
Laki-laki	60,21	57,72	60,67
Perempuan	38,65	38,71	39,78
Perkotaan	48,23	46,85	49,75
Perdesaan	50,86	49,82	50,87
<b>(15–64)</b>	<b>71,36</b>	<b>69,14</b>	<b>71,26</b>
Laki-laki	87,08	85,61	87,31
Perempuan	55,43	52,46	54,98
Perkotaan	69,61	66,76	69,77
Perdesaan	73,20	71,64	72,83
<b>(25–54)</b>	<b>80,30</b>	<b>77,74</b>	<b>79,79</b>
Laki-laki	98,04	96,97	98,12
Perempuan	62,35	58,30	61,24
Perkotaan	79,24	75,75	78,74
Perdesaan	81,42	79,84	80,89
<b>(25–34)</b>	<b>77,73</b>	<b>75,28</b>	<b>77,35</b>
Laki-laki	97,39	96,22	97,59
Perempuan	58,03	54,31	57,09
Perkotaan	78,11	74,88	77,66
Perdesaan	77,29	75,73	77,02
<b>(35–54)</b>	<b>82,05</b>	<b>79,42</b>	<b>81,44</b>
Laki-laki	98,48	97,47	98,49
Perempuan	65,32	61,04	64,09
Perkotaan	80,04	76,37	79,51
Perdesaan	84,10	82,53	83,41
<b>(55–64)</b>	<b>70,27</b>	<b>67,50</b>	<b>70,50</b>
Laki-laki	85,91	84,43	86,49
Perempuan	54,05	50,19	53,88
Perkotaan	62,93	60,00	63,87
Perdesaan	77,14	74,45	76,86
<b>65 Tahun keatas</b>	<b>39,88</b>	<b>37,38</b>	<b>40,20</b>
Laki-laki	57,02	53,42	56,34
Perempuan	26,40	24,37	27,55
Perkotaan	31,81	29,97	31,85
Perdesaan	46,48	43,56	46,81

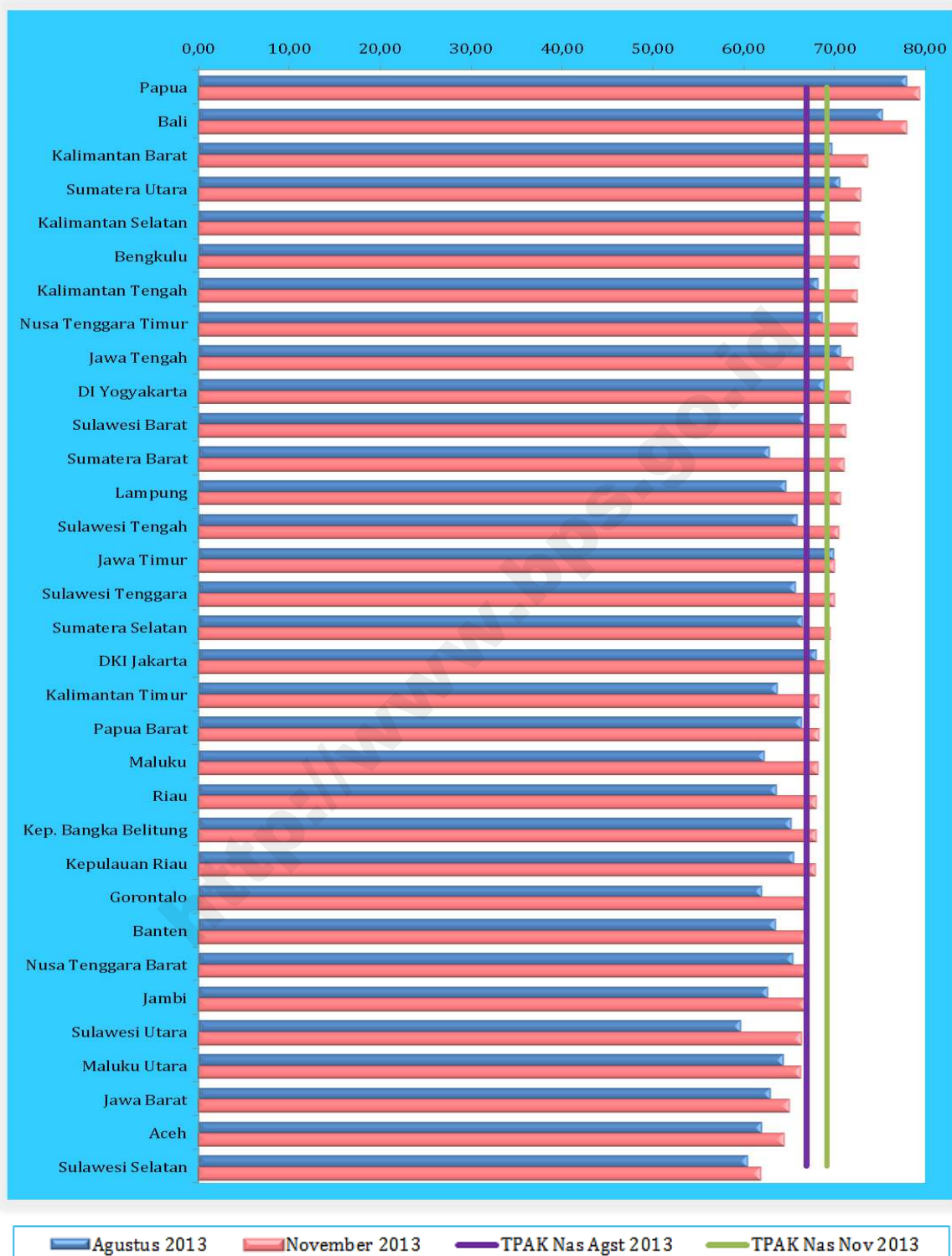
Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Agustus dan November 2013  
(persen)



TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas November 2013 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Papua (79,33 persen), Provinsi Bali (77,93 persen) dan Provinsi Kalimantan Barat (73,55 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan Sakernas Agustus 2013 posisi pertama dan kedua masih diduduki oleh Provinsi Papua (78,01 persen) dan Provinsi Bali (75,35 persen), hanya posisi ketiga yang berbeda, yang diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah (70,72

persen). Untuk provinsi dengan TPAK terendah pada November 2013 ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (61,88 persen), Provinsi Aceh (64,44 persen), dan Jawa Barat (64,98 persen). Urutan tiga provinsi dengan TPAK terendah sedikit berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, dimana posisi ini berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Utara (59,76 persen), Sulawesi Selatan (60,49 persen) dan Provinsi Gorontalo (62,00 persen). (Grafik 2).

Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013  
(persen)



## 4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

### 4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR)

Secara nasional, angka EPR pada November 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan Agustus 2013, yaitu meningkat 2,47 poin dari angka 62,72 menjadi 65,19 pada November 2013 ini. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada November 2013. Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, EPR November 2013 justru mengalami penurunan meskipun kecil, yaitu sebesar 0,04 poin dari angka 65,23.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, EPR laki-laki lebih tinggi hampir dua kali lipat dari EPR perempuan baik pada periode Mei, Agustus maupun November 2013. EPR laki-laki pada periode November 2013 sebesar 80,86 mengalami peningkatan sebesar 2,37 poin jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013. EPR perempuan pada November 2013 sebesar 49,58 juga mengalami peningkatan sebesar 2,57 poin dibandingkan keadaan Agustus 2013.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, EPR daerah perkotaan maupun

perdesaan pada periode Agustus 2013–November 2013 mengalami peningkatan, yaitu masing-masing naik sebesar 3,10 poin dan 1,82 poin.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode Agustus 2013–November 2013 meningkat sebesar 2,72 poin dari 37,83 menjadi 40,55. Sedangkan pada periode Mei 2013–November 2013 EPR penduduk kelompok umur muda justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,02 poin dari 40,57.

Pola yang sama juga terjadi pada penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun keatas), pada periode Agustus 2013–November 2013, mengalami peningkatan EPR sebesar 2,39 poin, yaitu dari angka 70,66 pada Agustus 2013 naik menjadi 73,05 pada November 2013. Periode Mei 2013–November 2013 EPR pada kelompok umur dewasa menurun tipis sebesar 0,04 poin dari angka 73,09 (Tabel 3).

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013  
(dalam juta)

Kelompok Umur	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Umur 15 Tahun keatas</b>	<b>175,66</b>	<b>176,66</b>	<b>177,23</b>
Laki-laki	87,68	88,19	88,48
Perempuan	87,97	88,47	88,76
Perkotaan	89,33	89,87	90,15
Perdesaan	86,32	86,79	87,09
<b>Umur Muda (15–24)</b>	<b>42,45</b>	<b>42,70</b>	<b>42,85</b>
Laki-laki	21,35	21,48	21,55
Perempuan	21,10	21,23	21,30
Perkotaan	22,12	22,26	22,33
Perdesaan	20,33	20,45	20,52
<b>Umur Dewasa (25+)</b>	<b>133,20</b>	<b>133,96</b>	<b>134,38</b>
Laki-laki	66,33	66,71	66,93
Perempuan	66,87	67,25	67,46
Perkotaan	67,21	67,61	67,82
Perdesaan	65,99	66,34	66,57
<b>Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja</b>	<b>114,59</b>	<b>110,80</b>	<b>115,55</b>
Laki-laki	70,70	69,21	71,54
Perempuan	43,89	41,59	44,01
Perkotaan	55,89	53,62	56,59
Perdesaan	58,70	57,18	58,96
<b>Umur Muda (15–24) yang Bekerja</b>	<b>17,22</b>	<b>16,15</b>	<b>17,38</b>
Laki-laki	10,46	9,76	10,66
Perempuan	6,77	6,40	6,72
Perkotaan	8,60	7,98	8,69
Perdesaan	8,63	8,17	8,69
<b>Umur Dewasa (25+) yang Bekerja</b>	<b>97,36</b>	<b>94,65</b>	<b>98,17</b>
Laki-laki	60,24	59,46	60,88
Perempuan	37,12	35,19	37,29
Perkotaan	47,29	45,64	47,90
Perdesaan	50,07	49,01	50,27



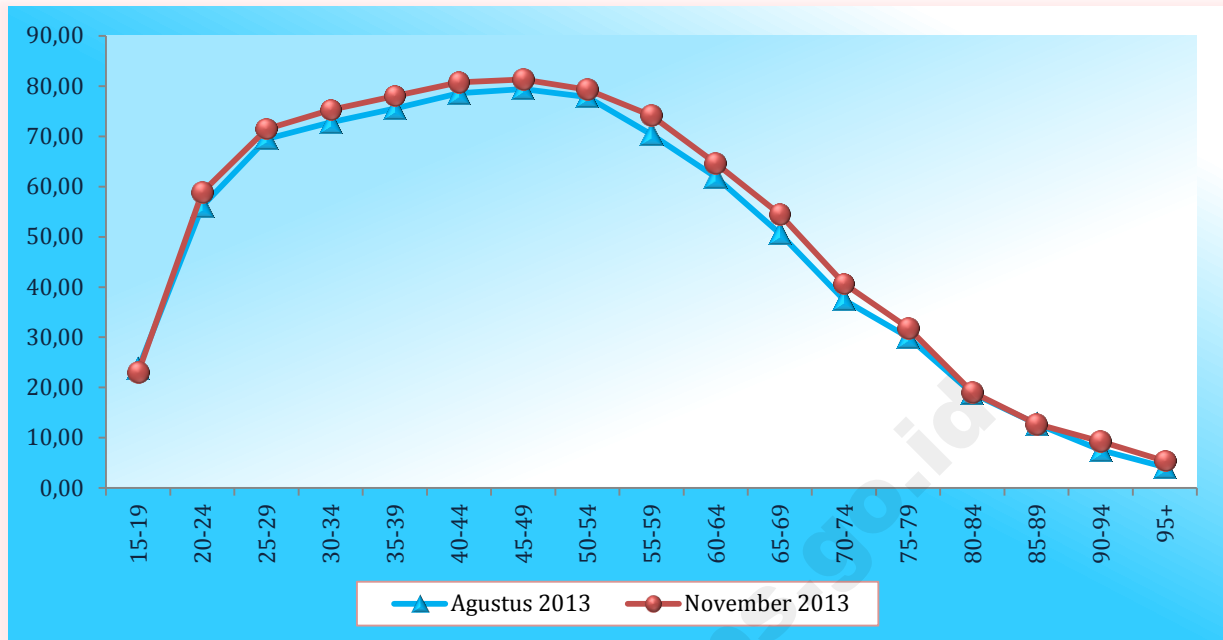
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013

Kelompok Umur	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>65,23</b>	<b>62,72</b>	<b>65,19</b>
Laki-laki	80,63	78,49	80,86
Perempuan	49,89	47,01	49,58
Perkotaan	62,56	59,67	62,77
Perdesaan	68,00	65,88	67,70
<b>Umur Muda (15–24)</b>	<b>40,57</b>	<b>37,83</b>	<b>40,55</b>
Laki-laki	48,97	45,42	49,46
Perempuan	32,07	30,14	31,54
Perkotaan	38,85	35,87	38,91
Perdesaan	42,45	39,95	42,35
<b>Umur Dewasa (25+)</b>	<b>73,09</b>	<b>70,66</b>	<b>73,05</b>
Laki-laki	90,82	89,13	90,97
Perempuan	55,51	52,33	55,28
Perkotaan	70,36	67,50	70,63
Perdesaan	75,87	73,88	75,52

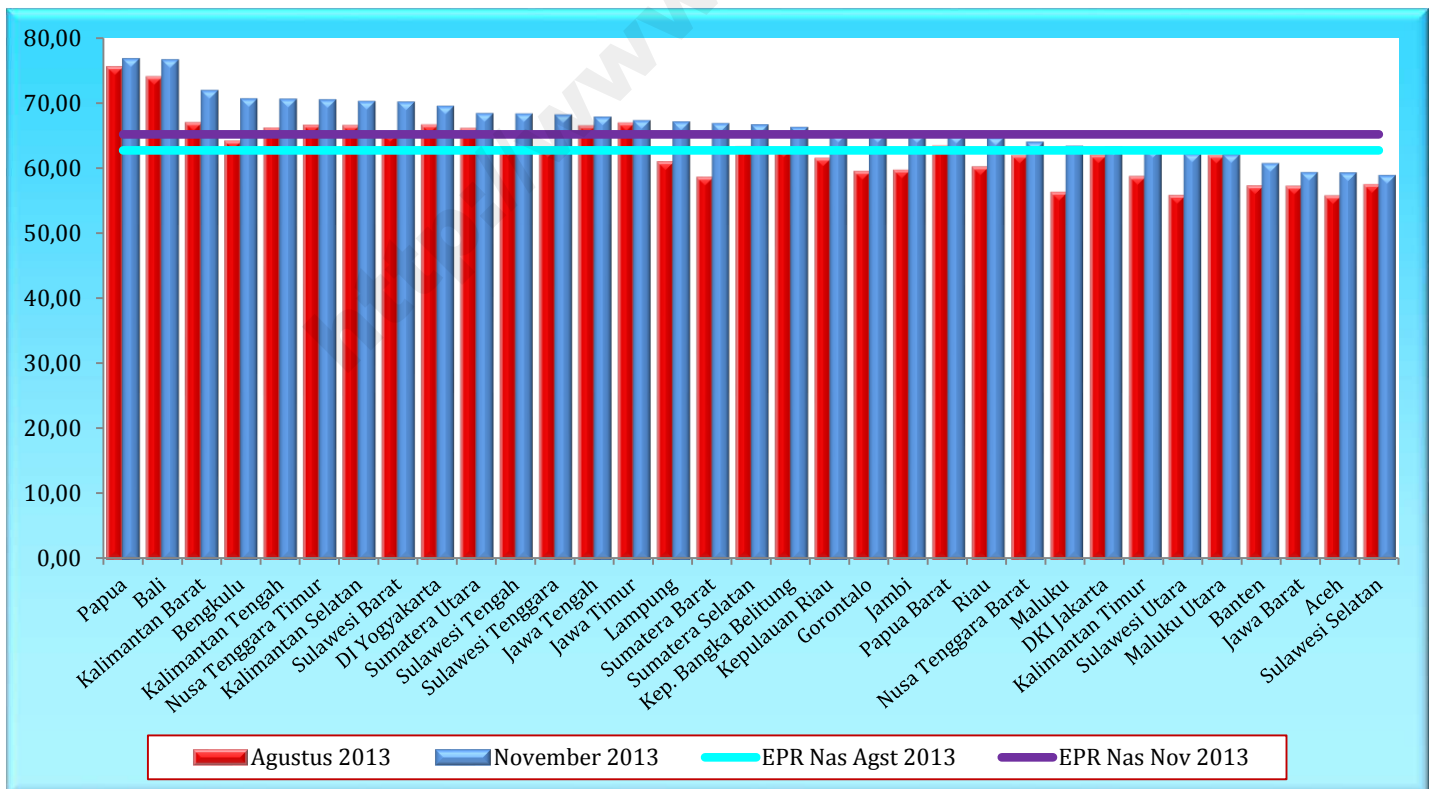
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 3 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 1. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR untuk Sakernas November 2013 ini berada pada kelompok umur 45–49 tahun. Pada periode Agustus dan November 2013 grafik EPR terlihat sangat berhimpitan pada kelompok umur 15–19 tahun dan kelompok umur 85-89 tahun.

Grafik 4 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada November 2013, yaitu Provinsi Papua (76,72), Bali (76,57) dan Kalimantan Barat (71,84). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Provinsi Sulawesi Selatan (58,82), Provinsi Aceh (59,22) dan Provinsi Jawa Barat (59,24). Ketiga provinsi dengan EPR terendah ini berada jauh dari nilai EPR rata-rata nasional yaitu 65,19.

Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Agustus dan November 2013



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013



## 4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada November 2013 ini polanya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan periode sebelumnya (Agustus 2013). Persentase terbesar diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha, yang meningkat tipis sebesar 0,05 persen poin dari 47,07 persen menjadi 47,12 persen. Persentase terbesar berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang naik tipis sebesar 0,07 persen poin dari 37,03 persen menjadi 37,10 persen. Hanya penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga yang mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dari 15,90 persen menjadi 15,78 persen.

Jika dibandingkan dengan keadaan pada periode Mei 2013-November 2013, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 0,50 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,47 persen poin, dan penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami peningkatan tipis sebesar 0,03 persen poin.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada keadaan November 2013 mencapai 59,45 persen, hal ini dapat dikatakan

bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 59 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, persentase pekerja rentan mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin, begitu pula bila dibandingkan dengan keadaan Mei 2013, persentase pekerja rentan juga menurun sebesar 0,19 persen poin.

Keadaan pekerja rentan menurut jenis kelamin pada Mei, Agustus, maupun November 2013 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki, sebagai fakta pada November 2013 ini persentase pekerja rentan perempuan sekitar 8 persen poin lebih tinggi dibanding pekerja rentan laki-laki.

Persentase pekerja rentan menurut provinsi yang ada di Indonesia ditunjukkan pada Grafik 5. Pada keadaan November 2013, provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi adalah Provinsi Papua (80,79 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (80,13 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (74,64 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 persentase pekerja rentan pada ketiga provinsi tersebut tidak mengalami perubahan posisi. Sementara itu, persentase pekerja rentan terendah pada November 2013

diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (27,41 (33,07 persen) dan urutan ketiga ditempati oleh persen), kemudian Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Banten (39,87 persen).

Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta)

Status Pekerjaan Utama	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>114,59</b>	<b>110,80</b>	<b>115,55</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	41,98	41,03	42,87
Berusaha	54,56	52,15	54,44
Pengusaha	4,27	3,76	3,99
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	38,42	37,37	38,59
Pekerja bebas	11,87	11,02	11,86
Pekerja keluarga	18,05	17,62	18,24
Pekerja rentan*)	68,34	66,01	68,70
<b>Laki-laki</b>	<b>70,70</b>	<b>69,21</b>	<b>71,54</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	27,05	27,05	27,95
Berusaha	38,82	37,37	38,84
Pengusaha	3,41	3,04	3,26
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	26,42	26,06	26,33
Pekerja bebas	8,99	8,27	9,25
Pekerja keluarga	4,83	4,79	4,75
Pekerja rentan*)	40,23	39,13	40,33
<b>Perempuan</b>	<b>43,89</b>	<b>41,59</b>	<b>44,01</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	14,93	13,99	14,92
Berusaha	15,75	14,78	15,60
Pengusaha	0,85	0,72	0,73
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	12,01	11,31	12,25
Pekerja bebas	2,89	2,75	2,62
Pekerja keluarga	13,21	12,82	13,49
Pekerja rentan*)	28,11	26,88	28,37

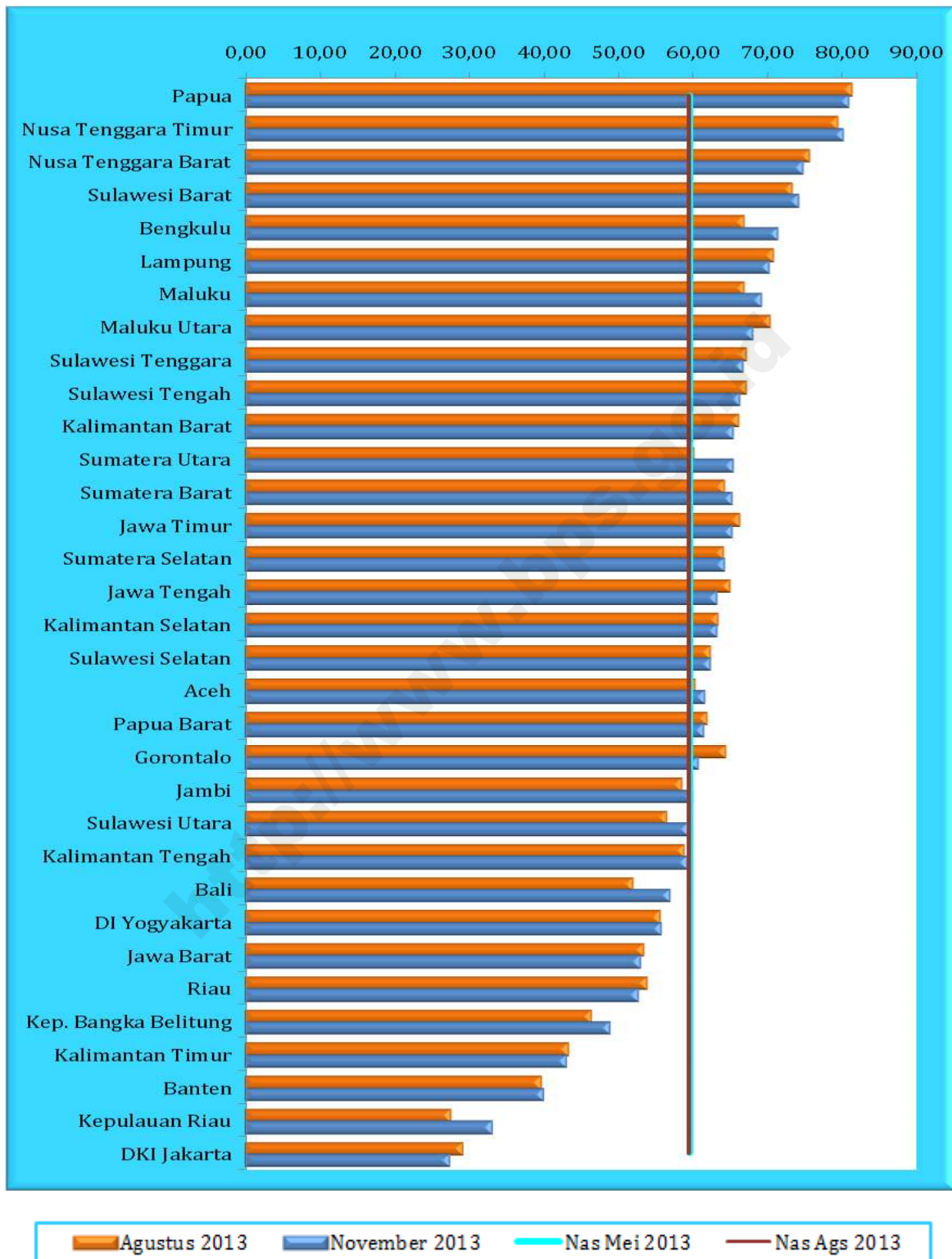
Keterangan: \*) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013

<b>Status Pekerjaan Utama</b>	<b>Mei</b>	<b>Agustus</b>	<b>November</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,63	37,03	37,10
Berusaha	47,62	47,07	47,12
Pengusaha	3,73	3,39	3,45
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	33,53	33,73	33,40
Pekerja bebas	10,36	9,95	10,27
Pekerja keluarga	15,75	15,90	15,78
Pekerja rentan*)	59,64	59,58	59,45
<b>Laki-laki</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,26	39,08	39,07
Berusaha	54,91	53,99	54,30
Pengusaha	4,83	4,39	4,56
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	37,37	37,65	36,81
Pekerja bebas	12,71	11,95	12,93
Pekerja keluarga	6,83	6,93	6,63
Pekerja rentan*)	56,91	56,53	56,37
<b>Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	34,01	33,63	33,89
Berusaha	35,88	35,54	35,44
Pengusaha	1,95	1,73	1,65
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	27,35	27,19	27,84
Pekerja bebas	6,58	6,62	5,95
Pekerja keluarga	30,11	30,83	30,67
Pekerja rentan*)	64,04	64,64	64,46

Keterangan: \*) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013



#### 4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Hasil Sakernas November 2013 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,21 persen, urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 34,19 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 21,60 persen.

Apabila diuraikan lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan sebesar 21,55 persen dan sektor jasa kemasyarakatan 15,63 persen. Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri dan sektor bangunan dengan persentase masing-masing sebesar 13,36 persen dan 6,58 persen.

Hasil Sakernas November 2013 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, sektor jasa-jasa turun sebesar 0,83 persen poin dari 45,04 persen. Sektor pertanian juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,17 persen poin dari 34,36 persen. Hanya sektor manufaktur yang mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1,00 persen poin dari 20,60 persen. Pola yang sama juga terjadi pada periode Mei 2013–November 2013, dimana sektor yang mengalami penurunan adalah sektor jasa-jasa dan sektor pertanian yaitu turun sebesar 0,22 persen poin dan 1,24

persen poin, sedangkan sektor manufaktur mengalami kenaikan sebesar 1,46 persen poin.

Komposisi sektoral Sakernas November 2013 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah Provinsi Papua (73,33 persen), provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Provinsi Kepulauan Riau (38,51 persen) dan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Provinsi DKI Jakarta (80,72 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, urutan provinsi dengan penduduk bekerja tertinggi di sektor pertanian, manufaktur dan jasa-jasa tidak mengalami perubahan hanya berbeda jumlah persentasenya saja. Pada Agustus 2013, persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian berada di Provinsi Papua mencapai 72,90 persen. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor manufaktur mencapai 37,70 persen. Sementara Provinsi DKI Jakarta dengan persentase penduduk tertinggi penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa mencapai 80,90 persen.

Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 (dalam juta)

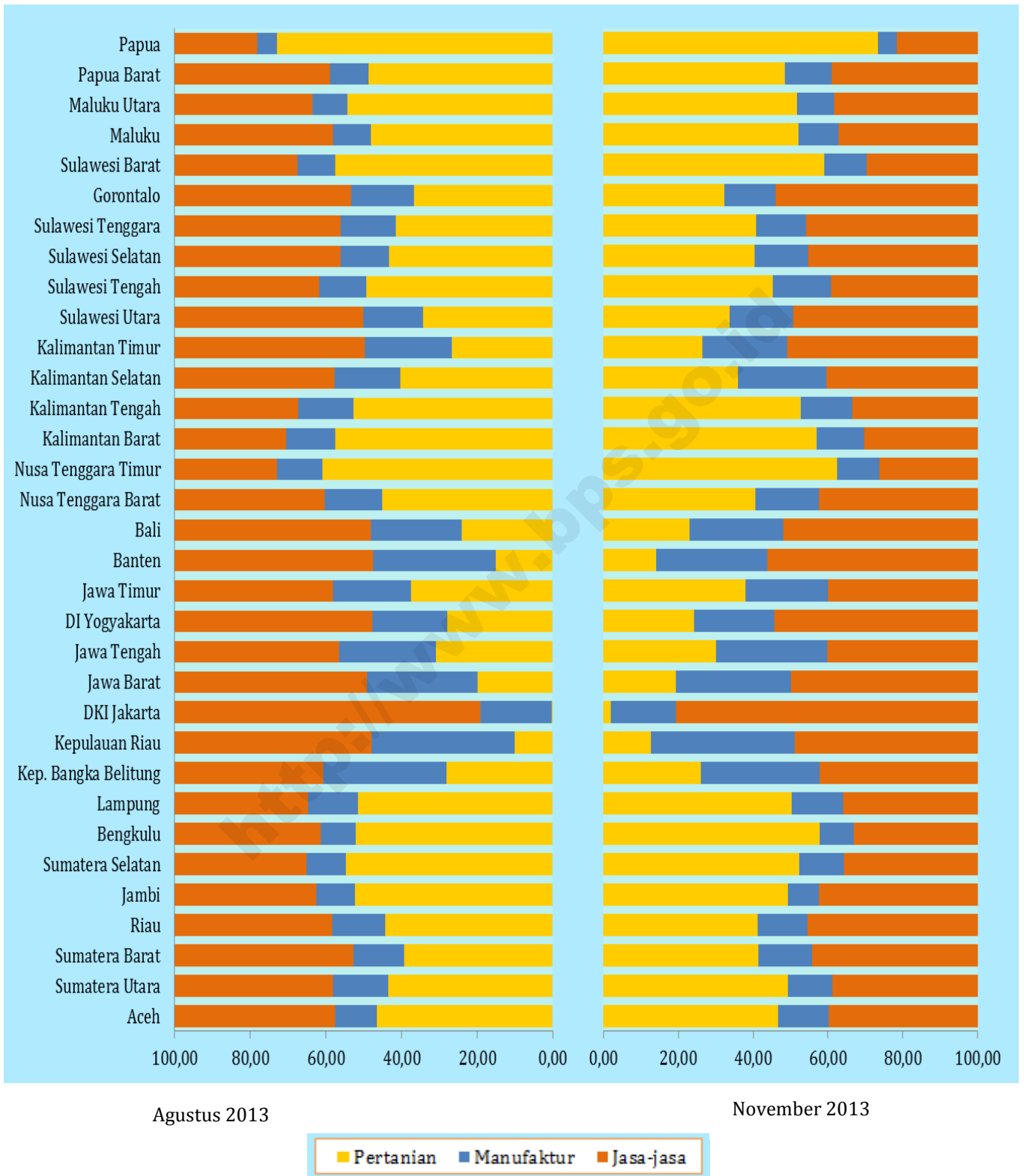
Lapangan Pekerjaan Utama	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>114,59</b>	<b>110,80</b>	<b>115,55</b>
Pertanian	40,60	38,07	39,50
Manufaktur	23,08	22,83	24,96
Pertambangan	1,61	1,42	1,64
Industri	14,51	14,88	15,44
Listrik, gas dan air	0,26	0,25	0,28
Bangunan	6,71	6,28	7,60
Jasa-jasa	50,91	49,90	51,08
Perdagangan	24,53	23,74	24,90
Transportasi	5,09	5,04	4,97
Keuangan	3,09	2,91	3,16
Jasa kemasyarakatan	18,21	18,21	18,05
<b>Laki-laki</b>	<b>70,70</b>	<b>69,21</b>	<b>71,54</b>
Pertanian	25,48	24,33	24,74
Manufaktur	16,77	16,50	18,29
Pertambangan	1,44	1,31	1,47
Industri	8,57	8,88	9,15
Listrik, gas dan air	0,23	0,22	0,25
Bangunan	6,53	6,09	7,42
Jasa-jasa	28,45	28,38	28,50
Perdagangan	11,73	11,73	11,85
Transportasi	4,76	4,70	4,67
Keuangan	2,23	2,13	2,23
Jasa kemasyarakatan	9,73	9,82	9,76
<b>Perempuan</b>	<b>43,89</b>	<b>41,59</b>	<b>44,01</b>
Pertanian	15,12	13,73	14,76
Manufaktur	6,31	6,33	6,67
Pertambangan	0,17	0,11	0,17
Industri	5,94	6,00	6,29
Listrik, gas dan air	0,03	0,03	0,04
Bangunan	0,17	0,19	0,18
Jasa-jasa	22,46	21,53	22,58
Perdagangan	12,80	12,01	13,05
Transportasi	0,33	0,34	0,30
Keuangan	0,86	0,79	0,93
Jasa kemasyarakatan	8,47	8,39	8,30



Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013

Lapangan Pekerjaan Utama	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Pertanian	35,43	34,36	34,19
Manufaktur	20,14	20,60	21,60
Pertambangan	1,40	1,28	1,42
Industri	12,66	13,43	13,36
Listrik, gas dan air	0,23	0,23	0,24
Bangunan	5,85	5,66	6,58
Jasa-jasa	44,43	45,04	44,21
Perdagangan	21,40	21,42	21,55
Transportasi	4,45	4,55	4,30
Keuangan	2,69	2,63	2,73
Jasa kemasyarakatan	15,89	16,44	15,63
<b>Laki-laki</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Pertanian	36,04	35,16	34,59
Manufaktur	23,72	23,84	25,57
Pertambangan	2,04	1,90	2,05
Industri	12,12	12,83	12,79
Listrik, gas dan air	0,32	0,31	0,35
Bangunan	9,24	8,80	10,38
Jasa-jasa	40,24	41,00	39,84
Perdagangan	16,59	16,95	16,57
Transportasi	6,74	6,79	6,52
Keuangan	3,15	3,07	3,11
Jasa kemasyarakatan	13,76	14,19	13,64
<b>Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Pertanian	34,44	33,02	33,55
Manufaktur	14,38	15,22	15,15
Pertambangan	0,38	0,25	0,38
Industri	13,53	14,44	14,29
Listrik, gas dan air	0,07	0,08	0,08
Bangunan	0,40	0,45	0,40
Jasa-jasa	51,18	51,76	51,30
Perdagangan	29,16	28,87	29,66
Transportasi	0,75	0,82	0,69
Keuangan	1,96	1,89	2,10
Jasa kemasyarakatan	19,31	20,18	18,85

Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus dan November 2013



#### 4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Pada November 2013, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,63 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan sebesar 0,76 persen poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 (23,39 persen), namun mengalami kenaikan sebesar 3,02 persen jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 (19,61 persen). Hasil Sakernas November 2013 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 33,69 persen dan 15,82 persen (Tabel 8).

Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, tingkat pekerja paruh waktu perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,79 persen poin (dari 31,90 persen menjadi 33,69 persen). Sedangkan pekerja paruh waktu laki-laki mengalami penurunan 2,46 persen poin (dari 18,28 persen menjadi 15,82 persen). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, selama periode yang sama, tingkat pekerja paruh waktu pada November 2013 mengalami penurunan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dengan penurunan masing-masing sebesar 1,07 persen poin dan 0,25 persen poin.

Sementara itu, pada Sakernas periode Mei 2013–November 2013, peningkatan terjadi pada tingkat pekerja paruh waktu untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, dan tingkat pekerja paruh waktu baik di daerah perdesaan maupun perkotaan.

Merujuk kembali pada hasil Sakernas November 2013, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (43,40 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (38,40 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (37,33 persen). Begitu pula pada periode Sakernas Agustus 2013, provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi juga diduduki oleh ketiga provinsi tersebut.

Untuk provinsi dengan tingkat paruh waktu terendah pada November 2013 terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (9,37 persen), Provinsi Banten (12,91 persen) dan Provinsi Kepulauan

Riau (14,22 persen). Ketiga provinsi ini juga menjadi provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada periode Sakernas Agustus 2013 (Grafik 8).

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2013 (persen)

Indikator	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>19,61</b>	<b>23,39</b>	<b>22,63</b>
Laki-laki	13,91	18,28	15,82
Perempuan	28,78	31,90	33,69
Perkotaan	13,21	15,30	15,05
Perdesaan	25,69	30,97	29,90
<b>Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu</b>	<b>56,23</b>	<b>51,18</b>	<b>56,70</b>

*Share* perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan Sakernas November 2013 mencapai 56,70 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 57 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada November 2013 terus mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan Agustus 2013 maupun Mei 2013, yaitu masing-masing meningkat sebesar 5,52 persen poin dan 0,47 persen poin (Tabel 8).

Grafik 7 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu tertinggi pada November 2013

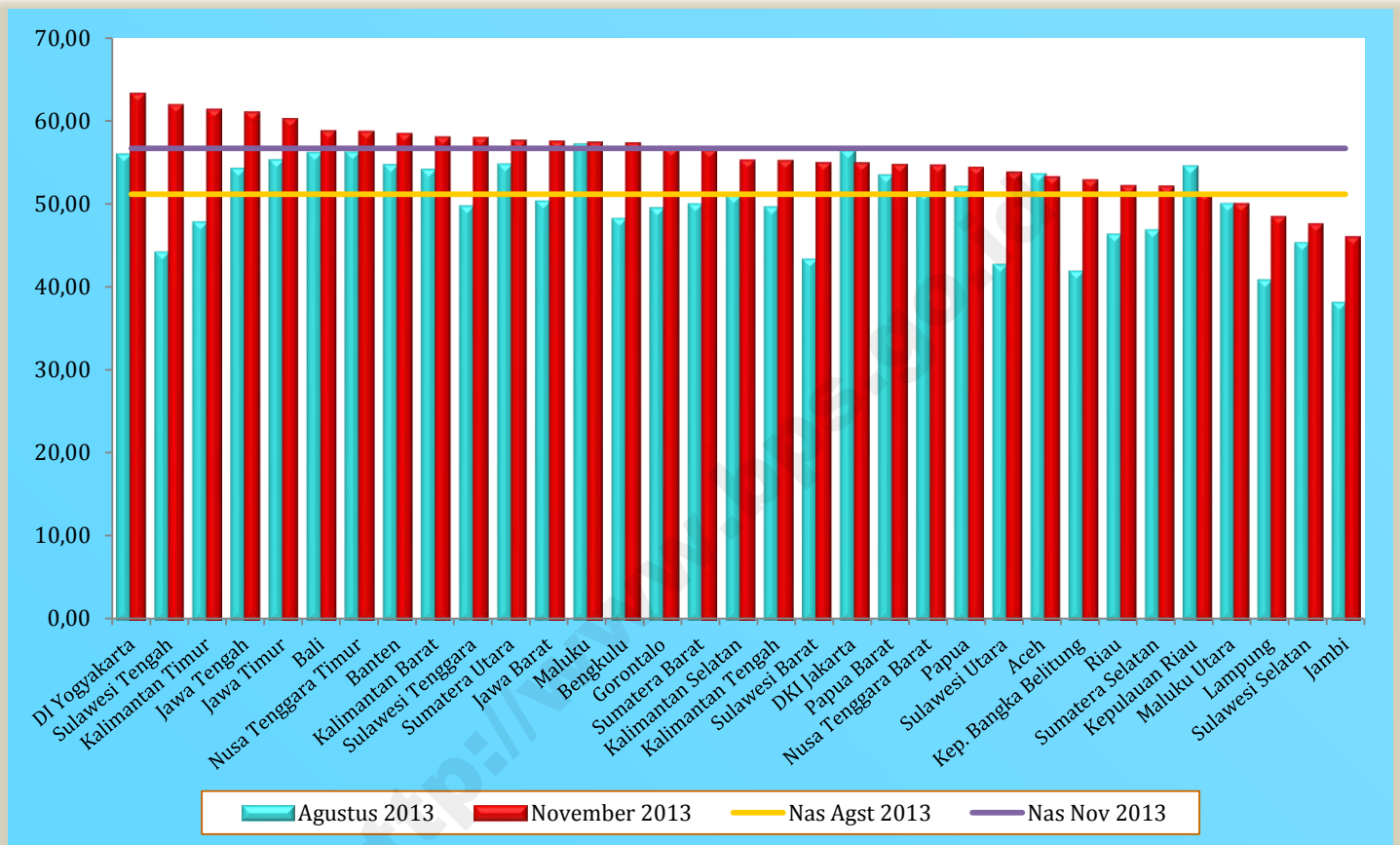
terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (63,18 persen), Provinsi Sulawesi Tengah (61,82 persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (61,25 persen). Sedangkan pada periode Agustus 2013 posisi ini diduduki oleh Provinsi Maluku (57,13 persen), Provinsi DKI Jakarta (56,34 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (56,17 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas November 2013 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Jambi sebesar 45,94 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 47,50 persen, dan Provinsi Lampung sebesar 48,35 persen.

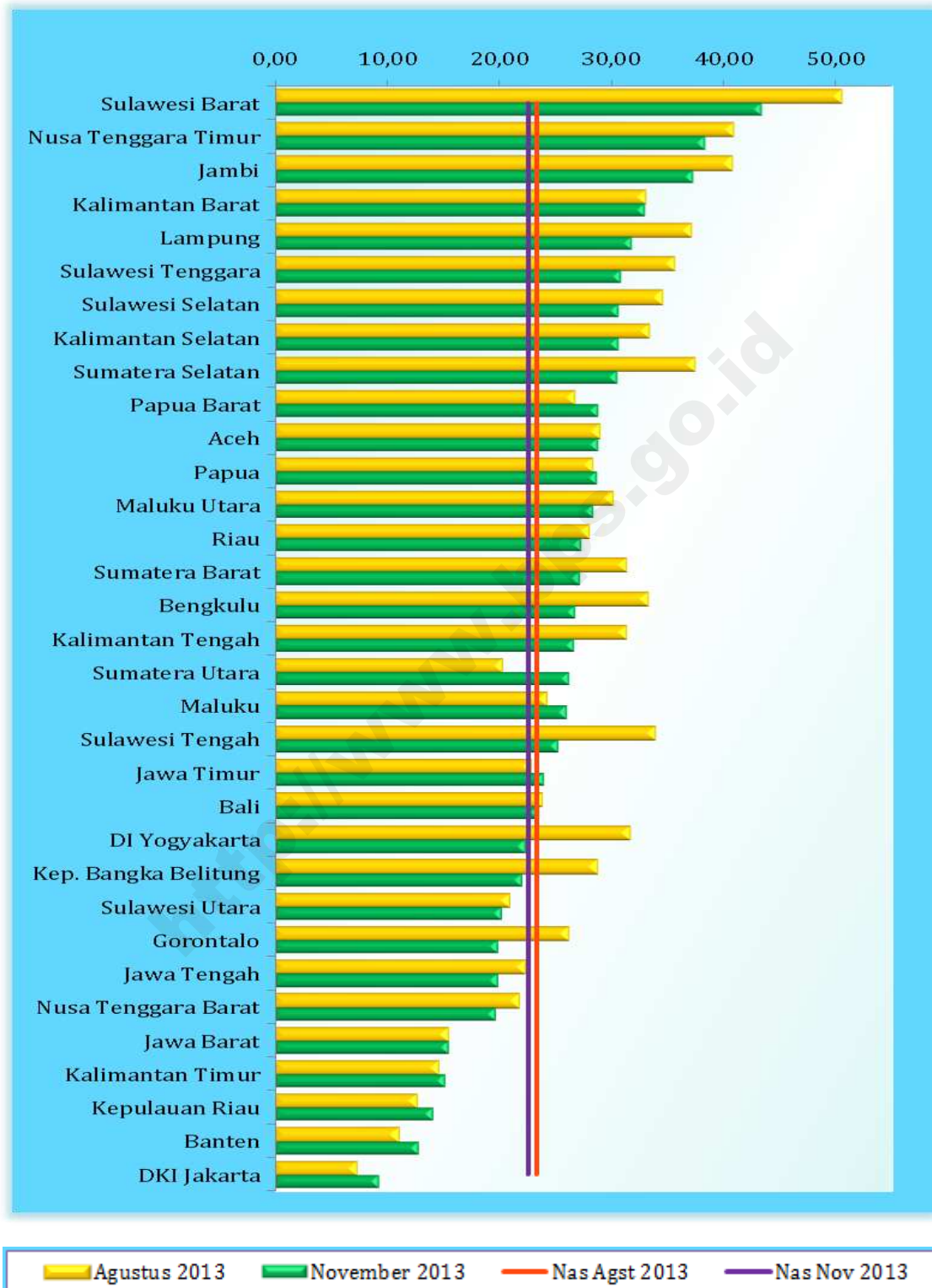
Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, posisi tersebut diduduki oleh Provinsi Jambi sebesar 38,09 persen, Provinsi Lampung

sebesar 40,79 persen, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 41,83 persen.

Grafik 7. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 (persen)



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013 (persen)



#### 4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada November 2013 mencapai 33,04 persen atau mengalami penurunan sebesar 6,45 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2013 (39,49 persen), namun mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin bila dibandingkan dengan Mei 2013 (32,62 persen).

Dapat dicermati pula pada Tabel 9, hasil Sakernas pada periode Mei, Agustus, dan November 2013, secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Seperti yang terjadi pada November 2013, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 44,03 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 26,28 persen.

Apabila kita amati, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut terjadi baik pada Mei, Agustus, maupun November 2013. Hasil Sakernas November

2013 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 43,18 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 22,48 persen.

Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 31,25 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 25,55 persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada November 2013, persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 20,99 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu mencapai 28,36 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013

Jumlah Jam Kerja	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0 jam*	1,60	6,27	1,86
1-14 jam	5,72	7,77	5,86
15-24 jam	11,58	13,27	12,03
25-34 jam	13,72	12,18	13,29
35-39 jam	10,09	10,24	10,16
40-48 jam	30,40	27,91	31,25
49-59 jam	15,38	12,79	14,63
60 jam keatas	11,51	9,57	10,92
<b>Laki-Laki</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0 jam*	1,65	6,42	1,93
1-14 jam	3,53	5,66	3,51
15-24 jam	8,73	11,47	9,08
25-34 jam	12,06	11,68	11,76
35-39 jam	9,66	9,75	9,64
40-48 jam	34,47	30,47	35,72
49-59 jam	18,24	14,67	17,14
60 jam keatas	11,66	9,88	11,22
<b>Perempuan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0 jam*	1,52	6,03	1,75
1-14 jam	9,23	11,28	9,69
15-24 jam	16,18	16,27	16,81
25-34 jam	16,39	13,03	15,78
35-39 jam	10,80	11,05	11,00
40-48 jam	23,84	23,65	23,98
49-59 jam	10,78	9,65	10,55
60 jam keatas	11,26	9,04	10,44

\*0 jam: Sementara tidak bekerja



Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013 (lanjutan)

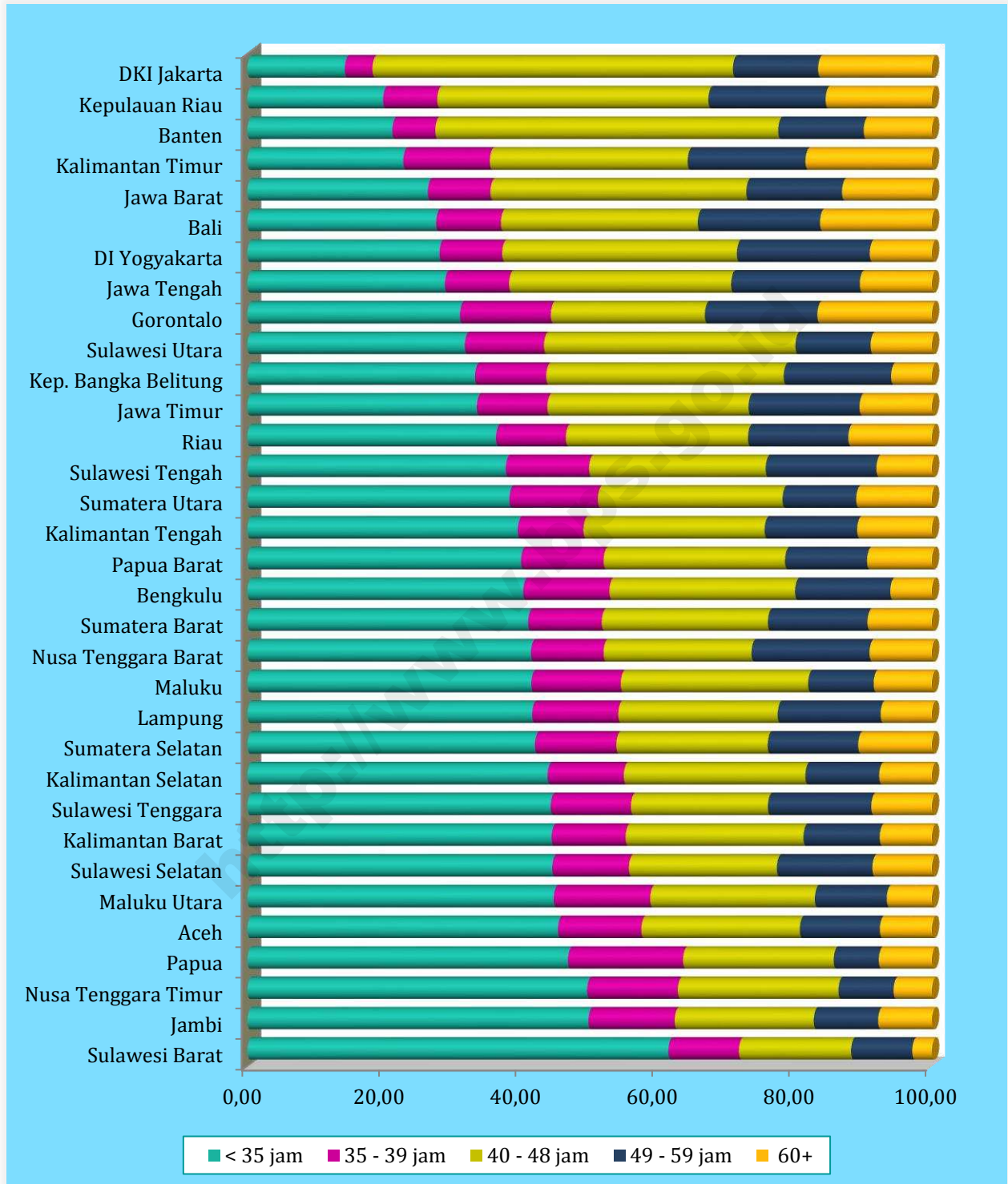
Jumlah Jam Kerja	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0 jam*	1,36	6,43	1,65
1–14 jam	3,85	4,92	3,95
15–24 jam	7,12	8,54	7,50
25–34 jam	9,31	8,28	9,38
35–39 jam	8,47	8,32	8,68
40–48 jam	37,62	35,53	39,10
49–59 jam	16,71	14,61	15,39
60 jam keatas	15,56	13,37	14,35
<b>Perdesaan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0 jam*	1,83	6,13	2,07
1–14 jam	7,49	10,44	7,70
15–24 jam	15,83	17,71	16,37
25–34 jam	17,91	15,84	17,04
35–39 jam	11,64	12,04	11,57
40–48 jam	23,53	20,76	23,72
49–59 jam	14,12	11,08	13,90
60 jam keatas	7,65	6,00	7,63

\*0 jam: Sementara tidak bekerja

Berdasarkan Sakernas November 2013 seperti yang terlihat pada Grafik 9 di bawah ini menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (61,42 persen), Provinsi Jambi (49,75 persen) dan Provinsi

Nusa Tenggara Timur (49,56 persen). Sedangkan sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (14,20 persen), Provinsi Kepulauan Riau (19,80 persen), dan Provinsi Banten (21,14 persen).

Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, November 2013



#### 4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013 pada Tabel 10, menunjukkan bahwa dari 115,55 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,31 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (61,60 juta orang).

Berdasarkan hasil Sakernas pada periode Mei, Agustus, dan November 2013 tampak adanya fluktuasi persentase penduduk bekerja di sektor informal, di tengah usaha pemerintah

untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Mei 2013 sebesar 53,56 persen, turun menjadi 52,58 persen pada Agustus 2013, dan kembali naik pada November 2013 menjadi 53,31 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Mei 2013 mencapai 46,44 persen, naik menjadi 47,42 persen pada Agustus 2013, dan turun pada November 2013 hingga mencapai 46,69 persen (Tabel 11).

Pada November 2013, berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yaitu mencapai 65,46 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Agustus dan Mei 2013 masing-masing mencapai 65,95 persen dan 64,58 persen.

Sedangkan pada kelompok perempuan, dari total 44,01 juta orang yang bekerja terdapat sebanyak 25,37 juta orang (57,65 persen) yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 18,64 juta orang (42,35 persen) bekerja pada sektor formal.

Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013 (dalam juta)

Kategori Sektor	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>114,59</b>	<b>110,80</b>	<b>115,55</b>
Laki-laki	70,70	69,21	71,54
Perempuan	43,89	41,59	44,01
Perkotaan	55,89	53,62	56,59
Perdesaan	58,70	57,18	58,96
<b>Formal</b>	<b>53,21</b>	<b>52,54</b>	<b>53,95</b>
Laki-laki	34,37	34,65	35,31
Perempuan	18,84	17,89	18,64
Perkotaan	35,63	35,54	35,99
Perdesaan	17,58	17,00	17,96
<b>Informal</b>	<b>61,38</b>	<b>58,26</b>	<b>61,60</b>
Laki-laki	36,33	34,56	36,23
Perempuan	25,05	23,70	25,37
Perkotaan	20,26	18,08	20,60
Perdesaan	41,12	40,18	41,00

Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013

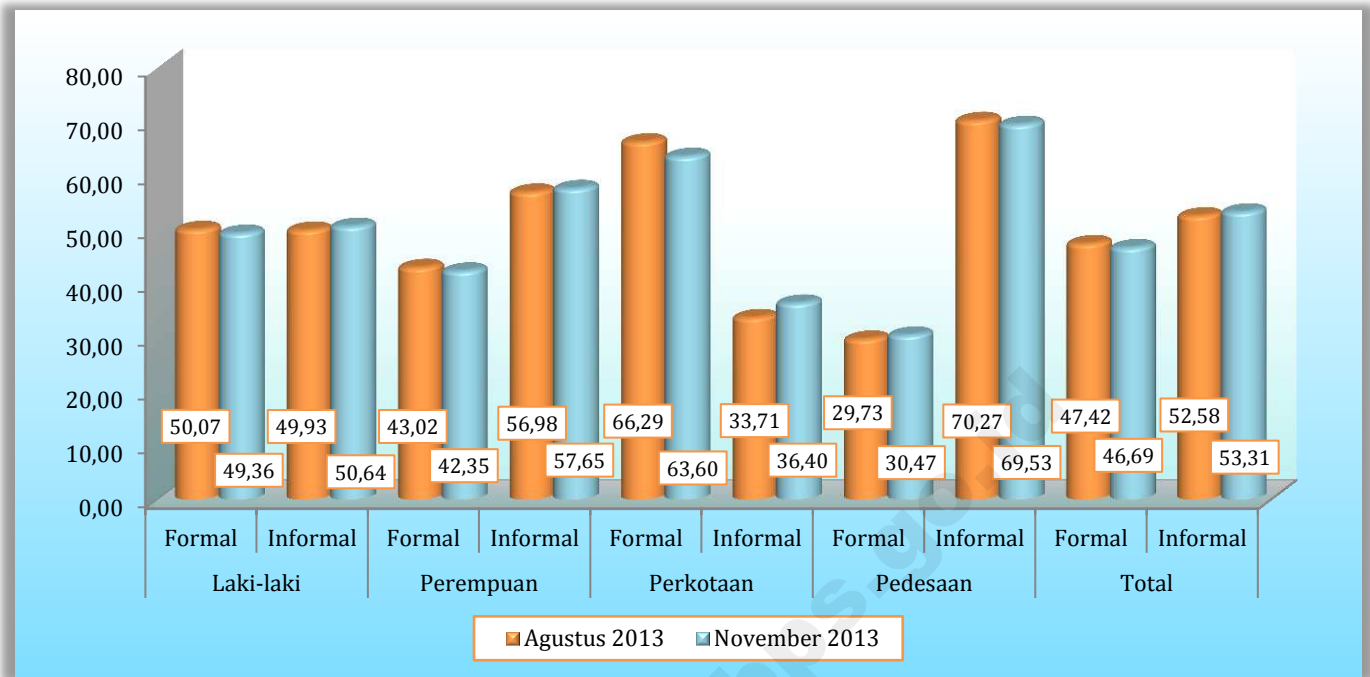
Kategori Sektor	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total Formal+Informal</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Formal	46,44	47,42	46,69
Informal	53,56	52,58	53,31
<b>Formal</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Laki-laki	64,58	65,95	65,46
Perempuan	35,42	34,05	34,54
Perkotaan	66,95	67,64	66,71
Perdesaan	33,05	32,36	33,29
<b>Informal</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Laki-laki	59,20	59,32	58,81
Perempuan	40,80	40,68	41,19
Perkotaan	33,01	31,03	33,44
Perdesaan	66,99	68,97	66,56

Berdasarkan Sakernas November 2013 pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pada penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 66,71 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 yang mencapai 67,64 persen (turun 0,93 persen poin), begitu pula bila dibandingkan Mei 2013 juga mengalami penurunan sebesar 0,24 persen poin. Sementara itu, di sisi lain persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, meski mengalami penurunan bila dibanding keadaan Agustus 2013 yaitu dari 68,97 persen pada Agustus 2013 turun menjadi 66,56 persen pada November 2013.

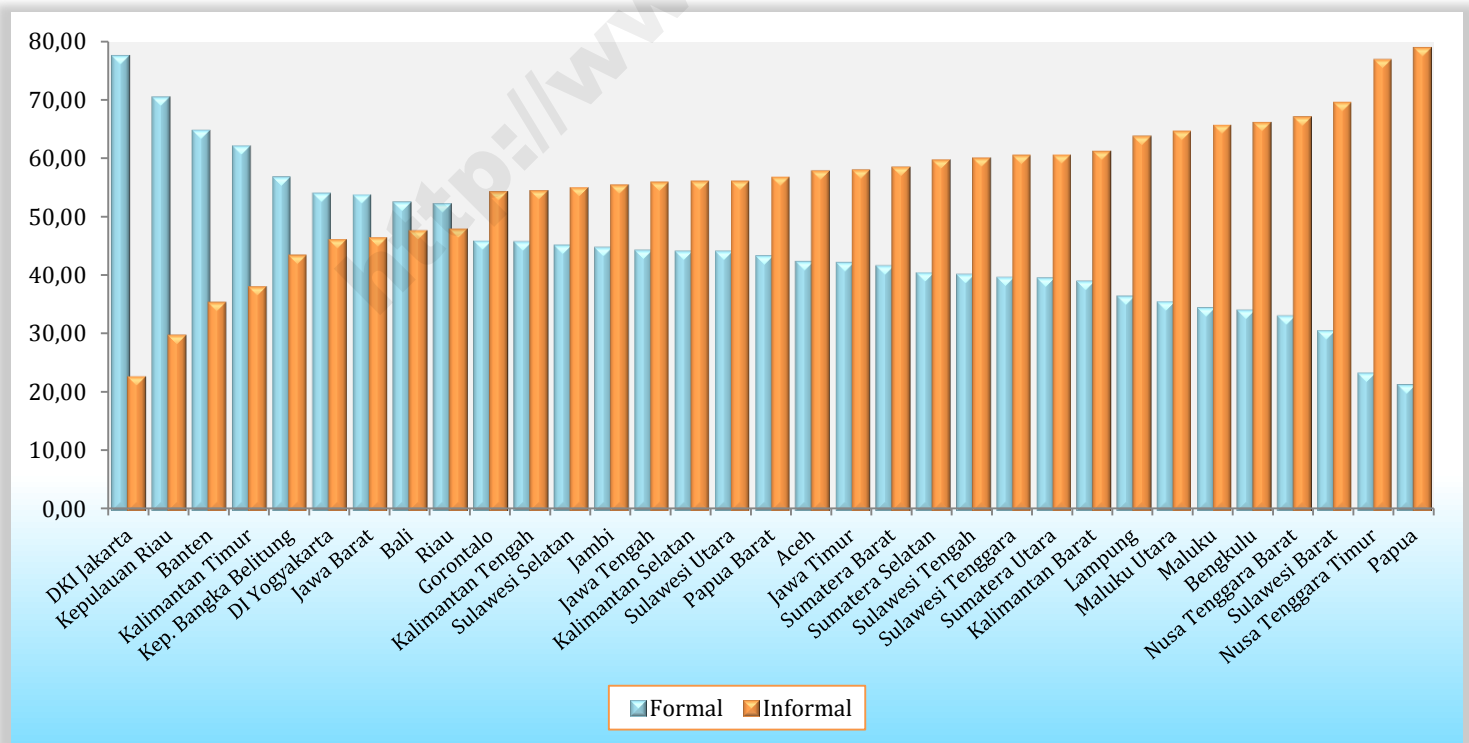
Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, ternyata provinsi yang mendominasi sektor formal lebih banyak

berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 11). Lima peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, empat diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (77,38 persen), Kepulauan Riau (70,32 persen), Banten (64,70 persen) dan Kepulauan Bangka Belitung (56,66 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (62,00 persen). Sementara itu disisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi dengan penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (78,81 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (76,79 persen), Provinsi Sulawesi Barat (69,53 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (66,99 persen), dan Provinsi Bengkulu (66,04 persen).

Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Agustus dan November 2013



Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, November 2013



## 5. INDIKATOR PENGANGGURAN

### 5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013, TPT di Indonesia cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus maupun Mei 2013. TPT pada November 2013 sebesar 5,77 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori

penganggur. Tabel 12 menunjukkan bahwa TPT pada November 2013 mengalami penurunan sebesar 0,48 persen poin bila dibandingkan Agustus 2013 (6,25 persen), dan turun sebesar 0,04 persen poin dibandingkan Mei 2013 (5,81 persen).

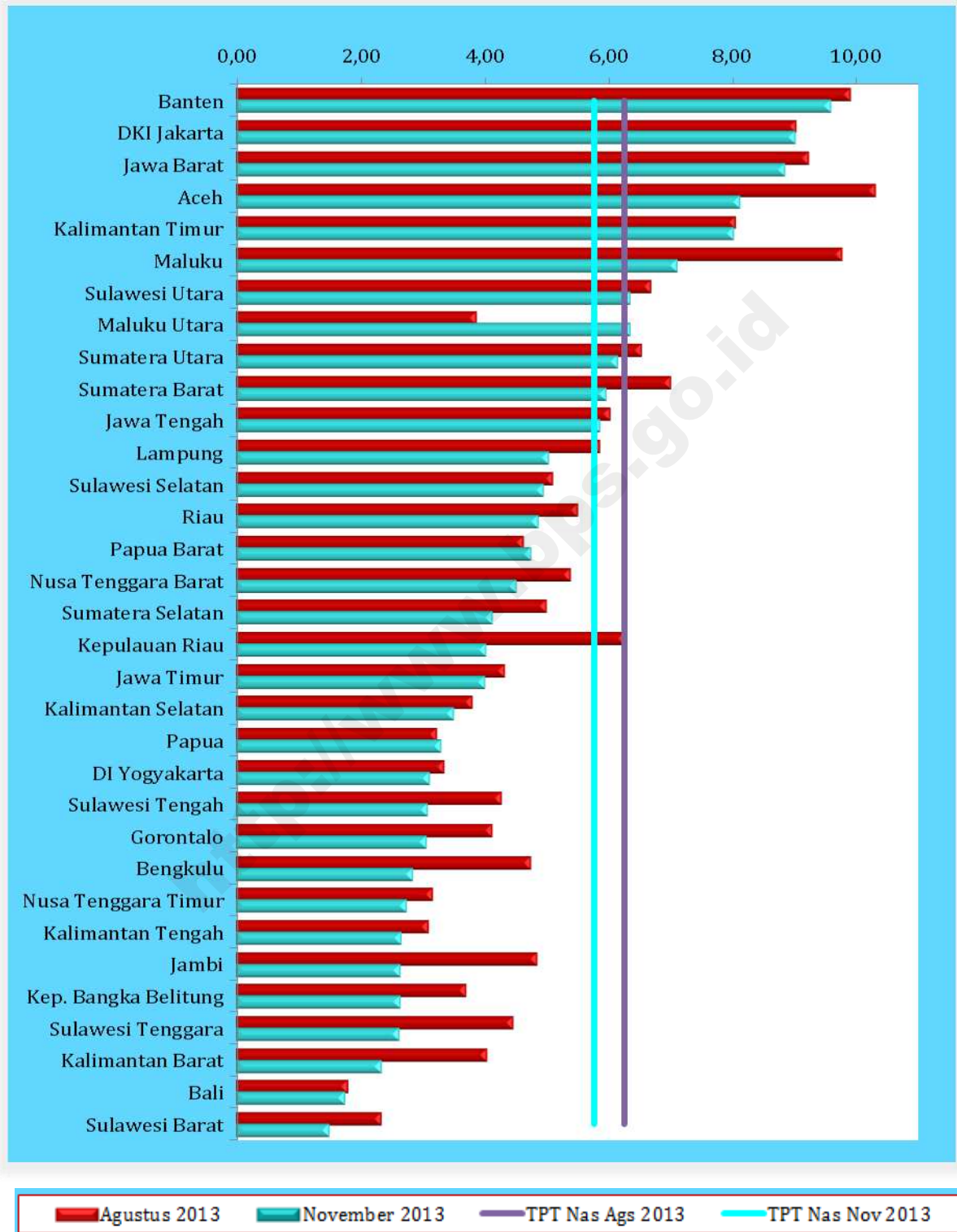
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2013 (persen)

TPT	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>5,81</b>	<b>6,25</b>	<b>5,77</b>
Laki-laki	5,49	6,09	5,42
Perempuan	6,32	6,52	6,33
Perkotaan	7,15	7,41	7,10
Perdesaan	4,50	5,14	4,46

Seiring penurunan TPT secara nasional, penurunan juga terlihat baik pada masing-masing jenis kelamin, maupun berdasarkan wilayah tempat tinggal. Kenaikan hanya terjadi pada TPT perempuan pada November 2013 bila dibandingkan dengan kondisi Mei 2013. TPT laki-laki pada November 2013 mengalami penurunan sebesar 0,67 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2013 atau turun

sebesar 0,07 persen poin bila dibandingkan dengan Mei 2013. Penurunan TPT pada wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 0,31 persen poin dan 0,68 persen poin bila dibandingkan hasil Sakernas Agustus 2013. Sementara itu, bila dibandingkan dengan Mei 2013, TPT daerah perkotaan turun sebesar 0,05 persen poin dan TPT daerah perdesaan turun sebesar 0,04 persen poin.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus dan November 2013  
(persen)





Masih merujuk pada hasil Sakernas November 2013, TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Banten (9,57 persen), Provinsi DKI Jakarta (9,00 persen), dan Provinsi Jawa Barat (8,83 persen). Sedangkan hasil Sakernas Agustus 2013 posisi tersebut diduduki oleh Provinsi Aceh, Provinsi Banten, dan Provinsi Maluku, dengan TPT masing-masing sebesar 10,30 persen, 9,90 persen, dan 9,75 persen. Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas November 2013 diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan

TPT sebesar 1,49 persen, kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Bali dengan TPT 1,75 persen, dan posisi ketiga diduduki Provinsi Kalimantan Barat dengan TPT sebesar 2,33 persen. Sementara itu, peringkat tiga provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas Agustus 2013 diduduki oleh Provinsi Bali (1,79 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (2,33 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi Kalimantan Tengah (3,09 persen). (selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 12).

## 5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

TPT penduduk pada kelompok umur muda berdasarkan hasil Sakernas November 2013 mencapai 19,35 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 19 orang yang menganggur. Angka tersebut turun sebesar 2,29 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2013 (21,64 persen) atau naik sebesar 1,33 persen poin bila dibandingkan Mei 2013 (18,02 persen), seperti yang tampak pada Tabel 13.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, baik pada Agustus maupun November 2013

menunjukkan bahwa TPT penduduk umur muda pada perempuan cenderung lebih tinggi daripada TPT pada laki-laki, akan tetapi keadaan pada Mei 2013 berbeda, yang menunjukkan bahwa TPT umur muda laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada November 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Agustus 2013 dengan penurunan pada kelompok laki-laki lebih tinggi daripada kelompok perempuan. Seperti terlihat pada Tabel 13, TPT umur muda laki-laki mengalami penurunan sebesar 2,83 persen poin, sedangkan pada perempuan penurunan mencapai 1,44 persen poin.

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan perbedaan daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada November 2013, TPT daerah perkotaan mencapai 21,79 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 16,76 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 22 orang yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan hanya sekitar 17 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada November 2013 sebesar 6,74 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda tujuh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan penurunan TPT umur muda pada November 2013, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami penurunan sebesar 0,47 poin bila dibanding Agustus 2013. Sedangkan bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Mei 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,22 poin. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT

umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan seperti ditunjukkan berdasarkan hasil Sakernas Mei dan November 2013, namun hal ini tidak berlaku pada Agustus 2013, dimana rasio ini terlihat lebih tinggi pada kelompok perempuan daripada laki-laki. Sementara apabila dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013

Indikator	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>TPT Penduduk Umur Muda (%)</b>	<b>18,02</b>	<b>21,64</b>	<b>19,35</b>
Laki-laki	18,66	21,31	18,48
Perempuan	17,00	22,14	20,70
Perkotaan	19,45	23,43	21,79
Perdesaan	16,54	19,81	16,76
<b>Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa</b>	<b>5,52</b>	<b>7,21</b>	<b>6,74</b>
Laki-laki	6,77	7,07	6,87
Perempuan	4,18	7,43	6,53
Perkotaan	4,32	6,02	5,70
Perdesaan	8,01	9,20	8,59
<b>Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur (%)</b>	<b>53,55</b>	<b>60,37</b>	<b>58,96</b>
Laki-laki	58,42	58,86	58,96
Perempuan	46,81	62,72	58,96
Perkotaan	48,23	56,92	55,99
Perdesaan	61,84	65,17	63,62
<b>Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk Umur Muda (%)</b>	<b>8,92</b>	<b>10,45</b>	<b>9,73</b>
Laki-laki	11,23	12,30	11,21
Perempuan	6,57	8,57	8,23
Perkotaan	9,38	10,98	10,84
Perdesaan	8,41	9,87	8,52

*Share* penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas November 2013 cukup tinggi yaitu 58,96 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2013, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 59 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun.

Seperti yang terlihat pada Tabel 13, angka ini mengalami penurunan sebesar 1,41 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2013 akan tetapi naik sebesar 5,41 persen poin

bila dibandingkan dengan keadaan pada Mei 2013.

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada November 2013 sebesar 9,73 persen atau turun dari angka Agustus 2013 yang mencapai 10,45 persen. *Share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda sebesar 9,73 persen ini dapat diartikan bahwa pada November 2013 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 10 orang diantaranya menganggur.

### 5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas November 2013, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,65 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,84 persen (Tabel 14).

Seiring dengan penurunan TPT nasional periode November 2013 dibandingkan dengan Agustus 2013, penurunan TPT menurut tingkat pendidikan juga terjadi pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah dengan penurunan masing-masing sebesar 0,18 persen poin dan 1,62 persen poin. Sementara kenaikan TPT terjadi pada kelompok tidak pernah sekolah dan tingkat sekolah tinggi dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,37 persen poin dan 0,18 persen poin bila dibandingkan dengan periode yang sama.

Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPT pada tingkat pendidikan sekolah tinggi periode November 2013 dibandingkan Agustus 2013 tampak pada kelompok laki-laki maupun perempuan dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,10 persen poin dan 0,24 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa pada tingkat pendidikan dan periode yang sama, kenaikan hanya terjadi di daerah perkotaan yaitu sebesar 0,35 persen poin, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 0,35 persen poin.

Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 (persen)

Tingkat Pendidikan	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>5,81</b>	<b>6,25</b>	<b>5,77</b>
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>2,34</b>	<b>1,47</b>	<b>1,84</b>
Laki-laki	3,10	1,45	2,66
Perempuan	1,77	1,48	1,21
Perkotaan	5,13	3,76	4,37
Perdesaan	1,57	0,91	1,17
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>5,13</b>	<b>4,94</b>	<b>4,76</b>
Laki-laki	4,91	4,99	4,52
Perempuan	5,49	4,86	5,15
Perkotaan	6,82	6,13	6,38
Perdesaan	4,03	4,20	3,72
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>8,33</b>	<b>10,27</b>	<b>8,65</b>
Laki-laki	7,12	9,21	7,63
Perempuan	10,83	12,48	10,77
Perkotaan	8,55	9,91	8,62
Perdesaan	7,86	11,06	8,73
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>4,99</b>	<b>5,65</b>	<b>5,83</b>
Laki-laki	5,14	5,16	5,26
Perempuan	4,82	6,22	6,46
Perkotaan	5,20	5,71	6,06
Perdesaan	4,33	5,44	5,09

Secara keseluruhan pada periode November 2013 bila dibandingkan dengan Agustus 2013, kenaikan TPT terbesar terdapat pada mereka yang tidak pernah sekolah untuk kelompok laki-laki dengan kenaikan sebesar 1,21 persen poin. Pada Agustus 2013 TPT pada kelompok ini sebesar 1,45 persen, sedangkan pada November 2013 meningkat menjadi 2,66 persen.

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Berdasarkan data Sakernas baik pada Mei, Agustus, maupun November 2013 menunjukkan bahwa persentase penganggur terbanyak pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

Sebagai gambaran, pada November 2013, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 49,16 persen yang mengalami kenaikan sebesar 1,82 persen poin jika dibandingkan Agustus 2013 (47,34 persen), tetapi turun sebesar 4,08 persen poin dibandingkan Mei 2013 (53,24 persen).

Selama periode Agustus–November 2013, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan hanya terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dengan penurunan sebesar 3,72 persen poin. Penurunan persentase penganggur pada tingkat sekolah menengah terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal.

Mengamati lebih lanjut Tabel 15, baik pada keadaan Mei, Agustus, maupun November 2013, persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada November 2013, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 12,70 persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi hanya sebesar 8,24 persen.

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada November 2013, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 15, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 1,73 persen dan 60,11 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 1,09 persen dan 42,20 persen.

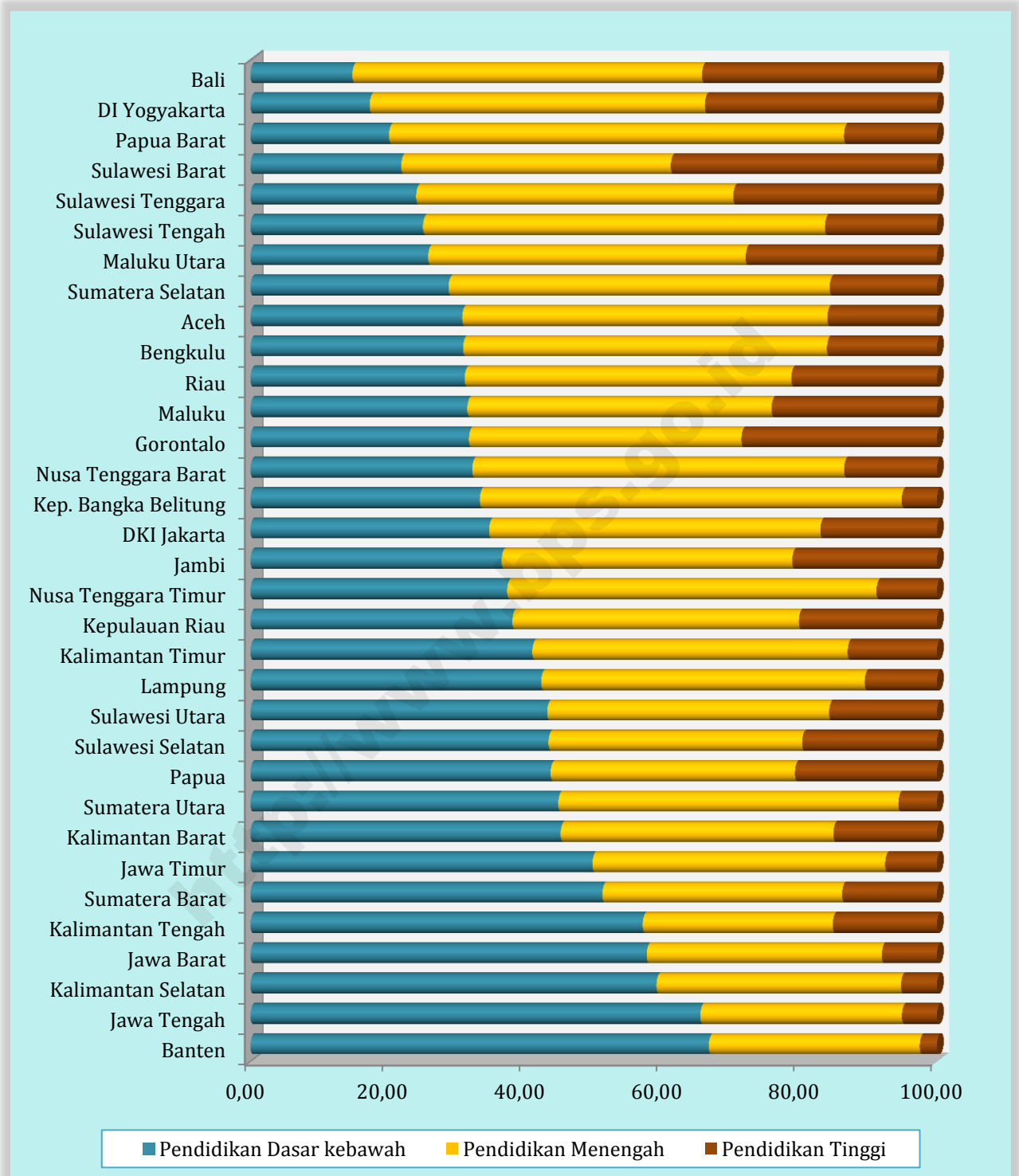
Grafik 13 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah pada November 2013, yaitu Provinsi Banten (66,74 persen), disusul oleh Provinsi Jawa Tengah (65,50 persen), dan Provinsi Kalimantan Selatan (59,11 persen) berada pada urutan ketiga. Sedangkan tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Sulawesi Barat (38,80 persen), Bali (34,25 persen) dan DI Yogyakarta (33,85 persen).

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Mei</b>	<b>Agustus</b>	<b>November</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>1,75</b>	<b>1,05</b>	<b>1,33</b>
Laki-laki	1,71	0,76	1,45
Perempuan	1,79	1,49	1,18
Perkotaan	1,36	0,91	1,09
Perdesaan	2,35	1,24	1,73
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>53,24</b>	<b>47,34</b>	<b>49,16</b>
Laki-laki	54,15	49,34	50,02
Perempuan	51,98	44,25	47,98
Perkotaan	45,81	38,70	42,20
Perdesaan	64,81	59,34	60,11
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>36,52</b>	<b>43,11</b>	<b>39,39</b>
Laki-laki	36,18	42,95	40,29
Perempuan	37,01	43,36	38,14
Perkotaan	41,81	49,04	43,60
Perdesaan	28,30	34,87	32,76
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>8,49</b>	<b>8,50</b>	<b>10,12</b>
Laki-laki	7,96	6,95	8,24
Perempuan	9,22	10,90	12,70
Perkotaan	11,02	11,35	13,11
Perdesaan	4,54	4,55	5,40



Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, November 2013



#### 5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas November 2013, mencapai 9,88 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 6,10 juta orang berjenis kelamin

laki-laki dan sisanya sebanyak 3,78 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada November 2013, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,61 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,27 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2013 (dalam juta)

Setengah Penganggur	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>13,07</b>	<b>10,89</b>	<b>9,88</b>
Laki-laki	7,36	7,28	6,10
Perempuan	5,71	3,61	3,78
Perkotaan	3,95	3,45	3,27
Perdesaan	9,12	7,44	6,61

Pada periode Sakernas Agustus–November 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 1,01 juta orang. Penurunan angka secara nasional ini diikuti penurunan jumlah setengah penganggur pada jenis kelamin laki-laki yang turun sebesar 1,18 juta orang, sedangkan pada perempuan naik sebanyak 170 ribu orang. Penurunan juga terjadi baik di wilayah perkotaan yang turun sejumlah 180

ribu orang, sedangkan di perdesaan penurunan jumlah setengah penganggur mencapai 830 ribu orang.

Sementara itu, persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada November 2013 mengalami penurunan baik bila dibandingkan dengan Agustus maupun Mei 2013 seperti yang terlihat pada Tabel 17 berikut ini.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada November 2013 sebesar 8,06 persen atau turun 1,16 persen poin dibanding Agustus 2013 (9,22 persen) dan turun 2,68 persen poin dibanding Mei 2013 (10,74 persen). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada Mei 2013, dari 100 orang

penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sebanyak 11 orang setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2013 turun menjadi sekitar 9 orang setengah penganggur, begitu pula pada November 2013 kembali turun hingga menjadi 8 orang setengah penganggur per 100 orang angkatan kerja.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2013

Indikator	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja</b>	<b>10,74</b>	<b>9,22</b>	<b>8,06</b>
Laki-laki	9,84	9,88	8,07
Perempuan	12,20	8,11	8,05
Perkotaan	6,56	5,96	5,37
Perdesaan	14,85	12,35	10,72
<b>Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja</b>	<b>11,41</b>	<b>9,83</b>	<b>8,55</b>
Laki-laki	10,41	10,52	8,53
Perempuan	13,02	8,68	8,60
Perkotaan	7,06	6,44	5,78
Perdesaan	15,55	13,01	11,22

Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja juga cenderung mengalami penurunan berdasarkan periode Sakernas Mei–November 2013. Pada Mei 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja sebanyak 11 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 10 orang, dan pada November 2013 turun menjadi sejumlah 9 orang setengah penganggur per 100 orang penduduk bekerja. Ditinjau

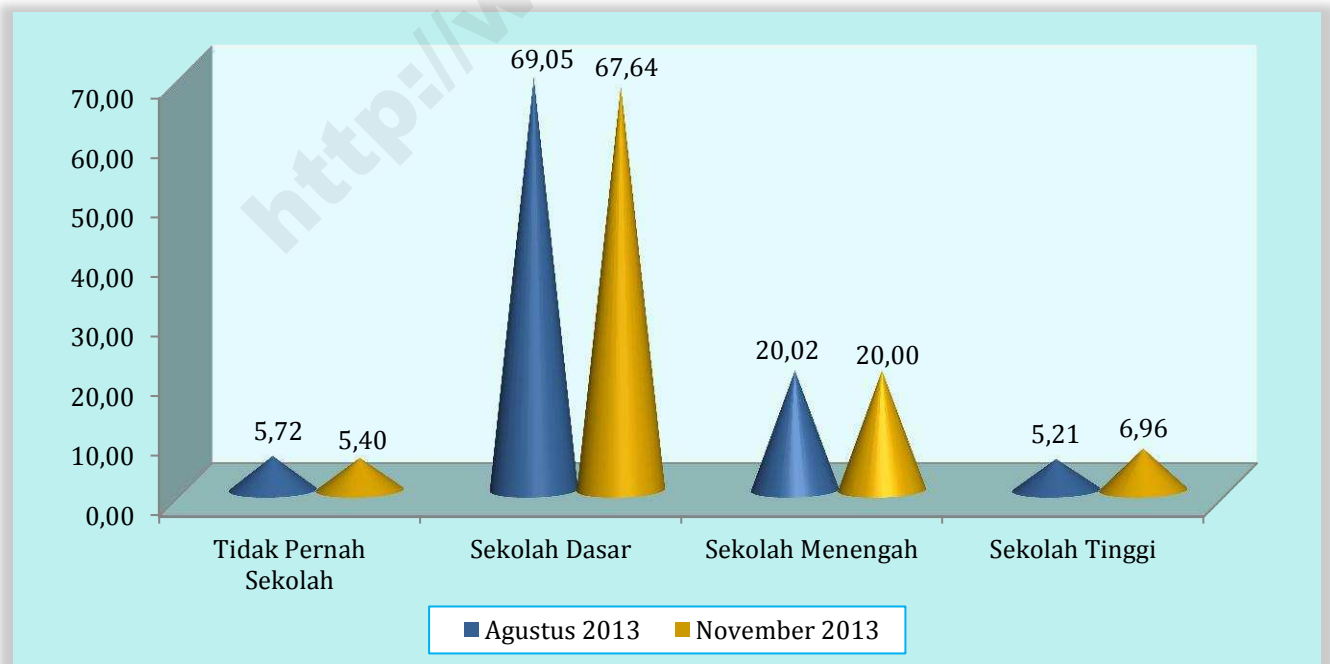
berdasarkan jenis kelamin selama Sakernas periode Agustus–November 2013, penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terdapat pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Sebagai gambaran, pada Agustus 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja, terdapat 11 orang laki-laki yang termasuk setengah penganggur, sedangkan pada November 2013, turun menjadi sebanyak 9 orang.

Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode Agustus–November 2013 penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada November 2013 dibandingkan Agustus 2013, terjadi penurunan sebesar 1,79 persen poin di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan penurunan hanya mencapai 0,66 persen poin.

Masih merujuk pada hasil Sakernas November 2013 (Grafik 14), penurunan persentase setengah penganggur menurut tingkat pendidikan terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, kecuali pada tingkat pendidikan sekolah tinggi yang mengalami kenaikan

sebesar 1,75 persen poin (dibandingkan keadaan Agustus 2013). Kenaikan pada tingkat pendidikan tinggi ini diikuti dengan kenaikan persentase setengah penganggur baik berdasarkan jenis kelamin maupun perbedaan klasifikasi wilayah kota-desa. Kenaikan pada kelompok laki-laki sebesar 1,07 persen poin, sedangkan pada kelompok perempuan naik sebesar 2,20 persen poin. Sementara kenaikan persentase setengah penganggur di wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing mencapai 1,97 persen poin dan 1,51 persen poin. Penurunan persentase setengah penganggur menurut pendidikan terbesar pada periode ini terdapat pada tingkat pendidikan sekolah dasar yang turun sebesar 1,41 persen poin.

Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus dan November 2013



Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Mei</b>	<b>Agustus</b>	<b>November</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>5,27</b>	<b>5,72</b>	<b>5,40</b>
Laki-laki	3,71	4,21	4,51
Perempuan	7,27	8,76	6,84
Perkotaan	3,30	2,05	2,26
Perdesaan	6,11	7,42	6,95
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>70,01</b>	<b>69,05</b>	<b>67,64</b>
Laki-laki	70,47	71,63	70,04
Perempuan	69,42	63,84	63,76
Perkotaan	59,01	60,52	58,59
Perdesaan	74,77	73,01	72,11
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>19,38</b>	<b>20,02</b>	<b>20,00</b>
Laki-laki	21,67	20,46	20,68
Perempuan	16,44	19,12	18,92
Perkotaan	28,21	28,17	27,92
Perdesaan	15,57	16,24	16,10
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>5,34</b>	<b>5,21</b>	<b>6,96</b>
Laki-laki	4,15	3,70	4,77
Perempuan	6,87	8,28	10,48
Perkotaan	9,48	9,26	11,23
Perdesaan	3,55	3,33	4,84

## 5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas November 2013 mencapai 30,81 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,81 persen.

Hasil Sakernas Mei, Agustus dan November 2013 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, tingkat ketidakaktifan pada November 2013 mengalami penurunan sebesar 2,29 persen poin, namun jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2013 naik sebesar 0,07 persen poin. Seiring penurunan tingkat ketidakaktifan (Sakernas Agustus–November 2013) juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja,

yaitu sebanyak 3,86 juta orang dari 58,47 juta orang pada Agustus 2013 menjadi 54,61 juta orang pada November 2013.

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas November 2013 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 15 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 47 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan penurunan masing-masing sebesar 1,91 persen poin dan 2,65 persen poin.

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2013  
(persen)

Tingkat ketidakaktifan	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	<b>30,74</b>	<b>33,10</b>	<b>30,81</b>
Laki-laki	14,69	16,42	14,51
Perempuan	46,74	49,72	47,07
Perkotaan	32,62	35,56	32,43
Perdesaan	28,79	30,55	29,14

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada November 2013 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 32,43 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 29,14 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada November 2013 mengalami penurunan sebesar 3,13 persen poin bila dibandingkan keadaan Agustus 2013. Begitu pula di daerah perdesaan juga mengalami penurunan sebesar 1,41 persen poin, yaitu dari 30,55 persen pada Agustus 2013 menjadi 29,14 persen pada November 2013.

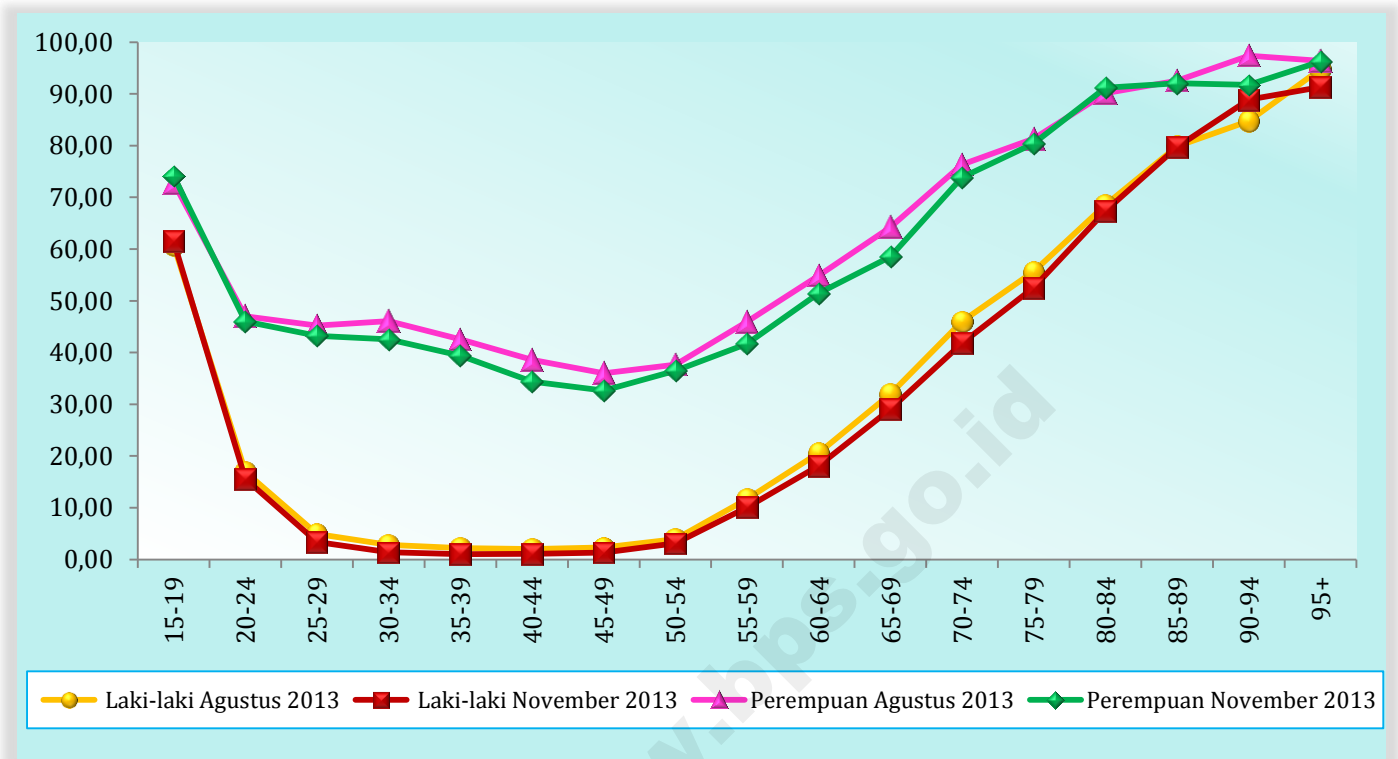
Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 15 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf "J").

Berdasarkan Grafik 15 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan

menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada November 2013, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 61,49 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,04 persen pada kelompok umur (40–44) tahun. Tingkat ketidakaktifan laki-laki kembali meningkat dimulai pada kelompok umur (45–49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 74,11 persen. Kemudian pada kelompok umur (30–34) tahun, tingkat ketidakaktifan perempuan mulai terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45–49) tahun yaitu sebesar 32,64 persen. Tingkat ketidakaktifan perempuan kembali meningkat pada kelompok umur (50–54) tahun.

Grafik 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus dan November 2013 (persen)





## 6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

### KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Berdasarkan hasil Sakernas November 2013, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Agustus 2013. Angkatan kerja pada November 2013 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar

59,56 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,25 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 10,01 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,18 persen (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada November 2013, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 12,45 persen dibandingkan 8,49 persen.

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa pada kelompok usia muda, baik pada Agustus maupun November 2013, persentase angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (mencapai 50 persen lebih), kemudian disusul pada jenjang sekolah menengah.

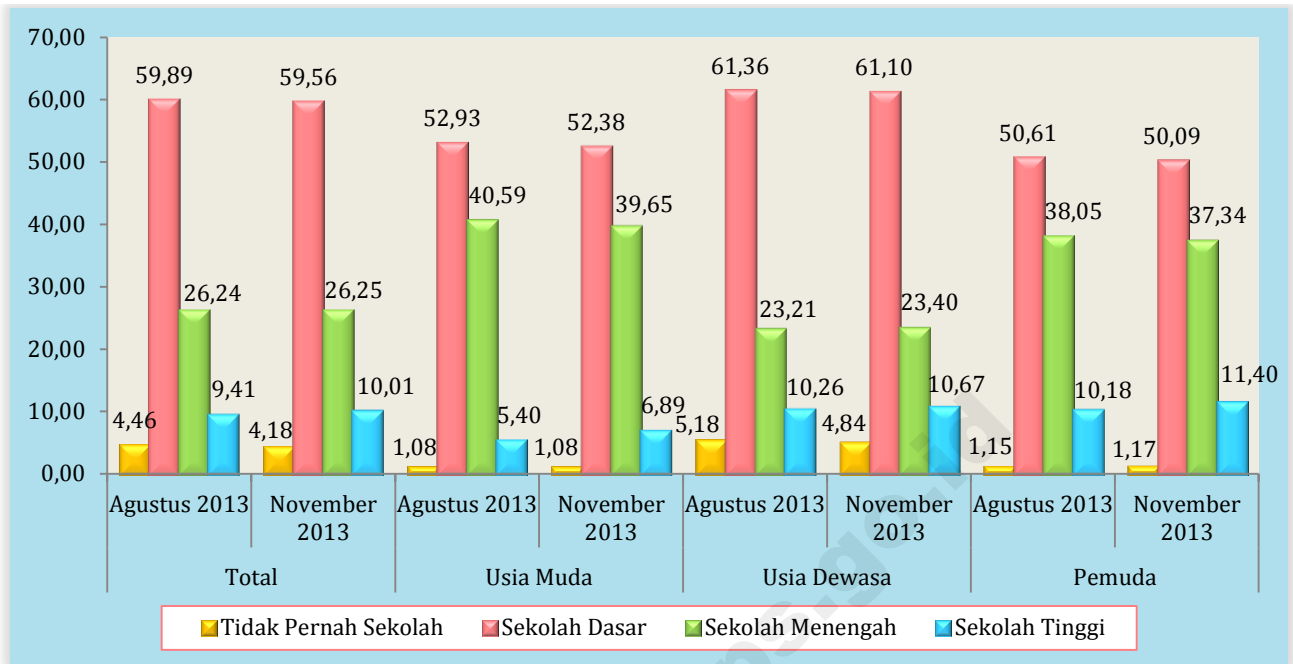
Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda dimana angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Sementara itu, seperti tampak pada Grafik 17, pada November 2013, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar kebawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

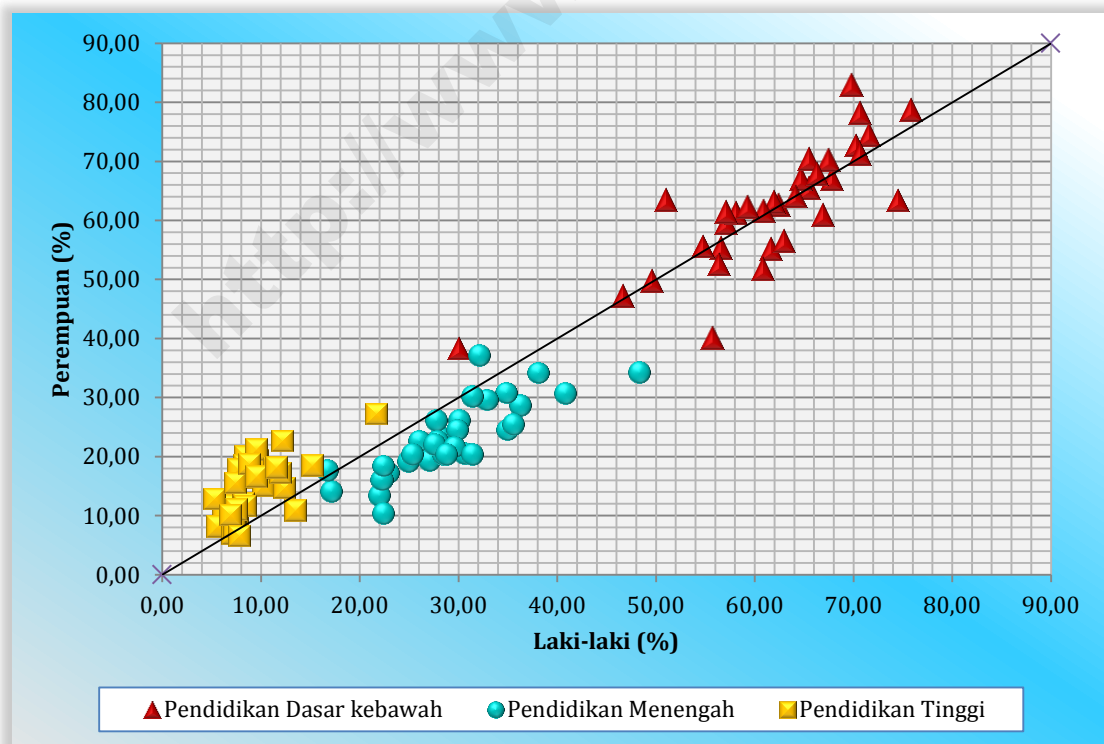
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Mei</b>	<b>Agustus</b>	<b>November</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>4,33</b>	<b>4,46</b>	<b>4,18</b>
Laki-laki	3,04	3,19	2,95
Perempuan	6,39	6,57	6,16
Perkotaan	1,89	1,80	1,76
Perdesaan	6,72	7,02	6,56
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>60,31</b>	<b>59,89</b>	<b>59,56</b>
Laki-laki	60,57	60,20	59,93
Perempuan	59,90	59,36	58,97
Perkotaan	48,00	46,78	46,98
Perdesaan	72,37	72,48	71,99
<b>Sekolah Menengah</b>	<b>25,47</b>	<b>26,24</b>	<b>26,25</b>
Laki-laki	27,90	28,41	28,63
Perempuan	21,61	22,65	22,42
Perkotaan	34,95	36,69	35,91
Perdesaan	16,19	16,20	16,72
<b>Sekolah Tinggi</b>	<b>9,89</b>	<b>9,41</b>	<b>10,01</b>
Laki-laki	8,49	8,20	8,49
Perempuan	12,10	11,42	12,45
Perkotaan	15,16	14,73	15,35
Perdesaan	4,72	4,30	4,73

Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Agustus dan November 2013



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, November 2013



<http://www.bps.go.id>

# LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013  
(dalam ribu)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 608	1 646	3 253	1 619	1 658	3 277	1 628	1 667	3 295
Sumatera Utara	4 374	4 515	8 889	4 394	4 537	8 931	4 403	4 547	8 950
Sumatera Barat	1 660	1 749	3 408	1 669	1 757	3 426	1 673	1 762	3 435
Riau	2 105	1 979	4 084	2 127	2 000	4 127	2 145	2 017	4 161
Jambi	1 173	1 126	2 299	1 183	1 135	2 318	1 190	1 142	2 332
Sumatera Selatan	2 762	2 687	5 449	2 780	2 704	5 484	2 791	2 715	5 506
Bengkulu	633	609	1 242	637	612	1 249	639	615	1 254
Lampung	2 847	2 683	5 530	2 861	2 696	5 557	2 868	2 703	5 570
Kep. Bangka Belitung	490	449	940	495	454	949	499	457	955
Kepulauan Riau	698	664	1 361	707	673	1 380	715	681	1 396
DKI Jakarta	3 821	3 746	7 567	3 842	3 766	7 608	3 852	3 777	7 629
Jawa Barat	16 207	15 772	31 979	16 314	15 877	32 191	16 380	15 941	32 321
Jawa Tengah	11 756	12 195	23 952	11 790	12 230	24 020	11 792	12 233	24 025
DI Yogyakarta	1 349	1 412	2 761	1 355	1 419	2 774	1 357	1 421	2 779
Jawa Timur	13 987	14 705	28 692	14 040	14 762	28 802	14 056	14 779	28 835
Banten	4 093	3 936	8 029	4 130	3 970	8 100	4 155	3 995	8 150
Bali	1 524	1 527	3 051	1 535	1 538	3 073	1 542	1 545	3 087
Nusa Tenggara Barat	1 505	1 680	3 185	1 513	1 688	3 200	1 516	1 691	3 208
Nusa Tenggara Timur	1 507	1 592	3 099	1 517	1 602	3 120	1 524	1 610	3 134
Kalimantan Barat	1 559	1 496	3 055	1 566	1 502	3 068	1 568	1 505	3 073
Kalimantan Tengah	839	760	1 599	844	765	1 609	847	768	1 615
Kalimantan Selatan	1 360	1 347	2 707	1 369	1 356	2 725	1 375	1 362	2 737
Kalimantan Timur	1 455	1 283	2 738	1 472	1 297	2 769	1 484	1 309	2 793
Sulawesi Utara	859	831	1 689	863	835	1 698	865	837	1 702
Sulawesi Tengah	947	904	1 851	953	910	1 863	957	914	1 870
Sulawesi Selatan	2 721	2 985	5 706	2 734	3 000	5 734	2 740	3 006	5 747
Sulawesi Tenggara	759	772	1 531	764	778	1 541	768	781	1 549
Gorontalo	373	377	750	376	380	755	377	382	760
Sulawesi Barat	394	402	796	397	406	803	400	408	808
Maluku	527	528	1 056	532	533	1 065	535	537	1 072
Maluku Utara	364	350	714	367	352	719	369	354	724
Papua Barat	297	258	555	298	260	558	302	263	565
Papua	1 130	1 007	2 137	1 146	1 019	2 165	1 161	1 034	2 196
<b>Indonesia</b>	<b>87 682</b>	<b>87 972</b>	<b>175 654</b>	<b>88 189</b>	<b>88 473</b>	<b>176 662</b>	<b>88 478</b>	<b>88 756</b>	<b>177 234</b>

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013  
(dalam juta)

Kelompok Umur	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>15 Tahun keatas</b>	<b>175,66</b>	<b>176,66</b>	<b>177,23</b>
Laki-laki	87,68	88,19	88,48
Perempuan	87,97	88,47	88,76
Perkotaan	89,33	89,87	90,15
Perdesaan	86,32	86,79	87,09
<b>(15–24)</b>	<b>42,45</b>	<b>42,71</b>	<b>42,85</b>
Laki-laki	21,35	21,48	21,55
Perempuan	21,10	21,23	21,30
Perkotaan	22,12	22,26	22,33
Perdesaan	20,33	20,45	20,52
<b>(15–64)</b>	<b>163,92</b>	<b>164,24</b>	<b>165,41</b>
Laki-laki	82,52	82,62	83,28
Perempuan	81,40	81,61	82,12
Perkotaan	84,05	84,22	84,92
Perdesaan	79,86	80,02	80,48
<b>(25–54)</b>	<b>105,82</b>	<b>106,44</b>	<b>106,78</b>
Laki-laki	53,20	53,52	53,69
Perempuan	52,62	52,92	53,09
Perkotaan	54,37	54,70	54,87
Perdesaan	51,46	51,74	51,92
<b>(25–34)</b>	<b>42,86</b>	<b>43,12</b>	<b>43,26</b>
Laki-laki	21,45	21,58	21,65
Perempuan	21,41	21,54	21,61
Perkotaan	22,55	22,69	22,76
Perdesaan	20,31	20,43	20,50
<b>(35–54)</b>	<b>62,96</b>	<b>63,32</b>	<b>63,52</b>
Laki-laki	31,76	31,94	32,04
Perempuan	31,21	31,38	31,48
Perkotaan	31,82	32,01	32,11
Perdesaan	31,14	31,31	31,41
<b>(55–64)</b>	<b>15,64</b>	<b>15,09</b>	<b>15,77</b>
Laki-laki	7,96	7,63	8,04
Perempuan	7,68	7,46	7,74
Perkotaan	7,56	7,26	7,73
Perdesaan	8,08	7,83	8,05
<b>65 Tahun keatas</b>	<b>11,74</b>	<b>12,43</b>	<b>11,83</b>
Laki-laki	5,17	5,56	5,20
Perempuan	6,57	6,86	6,63
Perkotaan	5,28	5,65	5,22
Perdesaan	6,46	6,77	6,60



Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013  
(dalam ribu)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 313	797	2 110	1 294	740	2 034	1 356	768	2 124
Sumatera Utara	3 743	2 711	6 454	3 767	2 545	6 312	3 772	2 744	6 515
Sumatera Barat	1 406	982	2 387	1 321	835	2 156	1 437	1 002	2 439
Riau	1 823	940	2 763	1 771	855	2 626	1 839	990	2 829
Jambi	1 011	553	1 564	981	472	1 453	1 018	541	1 558
Sumatera Selatan	2 340	1 579	3 919	2 290	1 357	3 647	2 356	1 468	3 824
Bengkulu	548	357	905	524	317	841	548	363	911
Lampung	2 479	1 463	3 942	2 394	1 202	3 596	2 541	1 392	3 932
Kep. Bangka Belitung	429	221	651	425	195	620	435	214	649
Kepulauan Riau	607	347	954	605	300	905	621	327	948
DKI Jakarta	3 230	2 028	5 258	3 232	1 948	5 180	3 295	1 997	5 293
Jawa Barat	13 929	6 945	20 874	13 652	6 633	20 285	14 080	6 921	21 001
Jawa Tengah	10 021	6 951	16 972	9 928	7 059	16 987	10 150	7 148	17 297
DI Yogyakarta	1 068	866	1 933	1 051	860	1 911	1 081	910	1 991
Jawa Timur	11 819	8 118	19 938	11 936	8 201	20 138	11 977	8 210	20 186
Banten	3 561	1 914	5 475	3 429	1 718	5 146	3 556	1 908	5 464
Bali	1 295	1 086	2 381	1 287	1 028	2 315	1 316	1 090	2 406
Nusa Tenggara Barat	1 275	938	2 213	1 219	876	2 095	1 263	885	2 148
Nusa Tenggara Timur	1 269	973	2 242	1 225	919	2 144	1 260	1 009	2 269
Kalimantan Barat	1 351	875	2 225	1 311	829	2 140	1 355	906	2 261
Kalimantan Tengah	724	412	1 135	723	374	1 098	740	430	1 170
Kalimantan Selatan	1 181	739	1 920	1 168	715	1 883	1 229	761	1 990
Kalimantan Timur	1 319	612	1 931	1 248	518	1 766	1 290	616	1 906
Sulawesi Utara	726	376	1 102	702	313	1 015	744	384	1 129
Sulawesi Tengah	829	477	1 306	811	417	1 228	824	494	1 317
Sulawesi Selatan	2 254	1 416	3 670	2 200	1 268	3 468	2 268	1 288	3 556
Sulawesi Tenggara	642	429	1 070	625	389	1 014	647	436	1 084
Gorontalo	319	190	509	308	161	468	314	196	510
Sulawesi Barat	339	249	588	331	205	536	340	235	575
Maluku	424	285	709	414	250	663	431	299	730
Maluku Utara	304	174	478	302	161	463	308	171	479
Papua Barat	240	138	378	239	132	371	247	139	386
Papua	987	711	1 698	992	697	1 689	1 002	740	1 742
<b>Indonesia</b>	<b>74 803</b>	<b>46 852</b>	<b>121 655</b>	<b>73 705</b>	<b>44 488</b>	<b>118 193</b>	<b>75 639</b>	<b>46 981</b>	<b>122 620</b>

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja  
Menurut Kelompok Umur, 2013  
(dalam juta)

Kelompok Umur	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>15 Tahun keatas</b>	<b>121,66</b>	<b>118,19</b>	<b>122,62</b>
Laki-laki	74,80	73,70	75,64
Perempuan	46,85	44,49	46,98
Perkotaan	60,19	57,91	60,91
Perdesaan	61,47	60,28	61,71
<b>(15–24)</b>	<b>21,01</b>	<b>20,62</b>	<b>21,55</b>
Laki-laki	12,86	12,40	13,08
Perempuan	8,15	8,22	8,47
Perkotaan	10,67	10,43	11,11
Perdesaan	10,34	10,19	10,44
<b>(15–64)</b>	<b>116,97</b>	<b>113,55</b>	<b>117,87</b>
Laki-laki	71,86	70,73	72,71
Perempuan	45,12	42,81	45,15
Perkotaan	58,51	56,22	59,25
Perdesaan	58,46	57,33	58,62
<b>(25–54)</b>	<b>84,97</b>	<b>82,75</b>	<b>85,20</b>
Laki-laki	52,16	51,89	52,68
Perempuan	32,81	30,85	32,51
Perkotaan	43,08	41,44	43,20
Perdesaan	41,89	41,31	41,99
<b>(25–34)</b>	<b>33,31</b>	<b>32,46</b>	<b>33,47</b>
Laki-laki	20,89	20,76	21,13
Perempuan	12,42	11,70	12,34
Perkotaan	17,61	16,99	17,67
Perdesaan	15,70	15,47	15,79
<b>(35–54)</b>	<b>51,66</b>	<b>50,29</b>	<b>51,73</b>
Laki-laki	31,28	31,13	31,56
Perempuan	20,39	19,15	20,18
Perkotaan	25,47	24,45	25,53
Perdesaan	26,19	25,84	26,20
<b>(55–64)</b>	<b>10,99</b>	<b>10,19</b>	<b>11,12</b>
Laki-laki	6,84	6,44	6,95
Perempuan	4,15	3,75	4,17
Perkotaan	4,76	4,36	4,94
Perdesaan	6,23	5,83	6,18
<b>65 Tahun keatas</b>	<b>4,68</b>	<b>4,64</b>	<b>4,75</b>
Laki-laki	2,95	2,97	2,93
Perempuan	1,74	1,67	1,83
Perkotaan	1,68	1,69	1,66
Perdesaan	3,00	2,95	3,09

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 (persen)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	81,64	48,43	64,84	79,93	44,63	62,07	83,28	46,05	64,44
Sumatera Utara	85,57	60,05	72,60	85,71	56,10	70,67	85,65	60,34	72,80
Sumatera Barat	84,68	56,14	70,04	79,19	47,51	62,94	85,90	56,84	70,99
Riau	86,61	47,49	67,65	83,27	42,73	63,62	85,74	49,12	67,99
Jambi	86,17	49,10	68,02	82,92	41,55	62,66	85,50	47,35	66,82
Sumatera Selatan	84,73	58,76	71,92	82,36	50,20	66,50	84,42	54,06	69,45
Bengkulu	86,58	58,64	72,89	82,28	51,75	67,32	85,70	59,05	72,64
Lampung	87,07	54,53	71,29	83,66	44,58	64,70	88,59	51,50	70,59
Kep. Bangka Belitung	87,57	49,24	69,24	85,82	42,96	65,32	87,24	46,93	67,97
Kepulauan Riau	87,01	52,33	70,10	85,55	44,60	65,58	86,76	48,03	67,88
DKI Jakarta	84,53	54,14	69,49	84,13	51,72	68,09	85,54	52,88	69,37
Jawa Barat	85,94	44,04	65,27	83,68	41,78	63,01	85,96	43,42	64,98
Jawa Tengah	85,23	57,00	70,86	84,21	57,72	70,72	86,07	58,43	72,00
DI Yogyakarta	79,15	61,29	70,02	77,53	60,64	68,89	79,62	64,05	71,65
Jawa Timur	84,50	55,21	69,49	85,02	55,56	69,92	85,21	55,55	70,01
Banten	87,00	48,63	68,19	83,03	43,26	63,53	85,58	47,77	67,05
Bali	84,95	71,13	78,03	83,88	66,83	75,35	85,33	70,54	77,93
Nusa Tenggara Barat	84,71	55,85	69,49	80,57	51,88	65,44	83,30	52,32	66,97
Nusa Tenggara Timur	84,17	61,14	72,34	80,72	57,35	68,72	82,69	62,67	72,41
Kalimantan Barat	86,63	58,46	72,84	83,73	55,19	69,75	86,38	60,18	73,55
Kalimantan Tengah	86,24	54,15	70,99	85,67	48,94	68,21	87,33	56,05	72,46
Kalimantan Selatan	86,82	54,88	70,93	85,29	52,72	69,08	89,41	55,90	72,73
Kalimantan Timur	90,67	47,71	70,54	84,81	39,95	63,79	86,95	47,03	68,24
Sulawesi Utara	84,58	45,23	65,23	81,34	37,45	59,76	86,01	45,91	66,29
Sulawesi Tengah	87,57	52,76	70,57	85,12	45,83	65,92	86,07	54,06	70,44
Sulawesi Selatan	82,83	47,44	64,31	80,47	42,27	60,49	82,76	42,85	61,88
Sulawesi Tenggara	84,59	55,51	69,92	81,85	50,03	65,79	84,30	55,87	69,96
Gorontalo	85,65	50,32	67,88	81,96	42,26	62,00	83,20	51,29	67,14
Sulawesi Barat	86,01	61,93	73,84	83,44	50,56	66,82	85,07	57,55	71,16
Maluku	80,45	53,86	67,13	77,78	46,89	62,31	80,64	55,66	68,13
Maluku Utara	83,53	49,66	66,94	82,29	45,72	64,38	83,42	48,29	66,21
Papua Barat	81,07	53,52	68,26	80,14	50,67	66,41	81,58	52,81	68,20
Papua	87,32	70,61	79,45	86,61	68,34	78,01	86,27	71,54	79,33
<b>Indonesia</b>	<b>85,31</b>	<b>53,26</b>	<b>69,26</b>	<b>83,58</b>	<b>50,28</b>	<b>66,90</b>	<b>85,49</b>	<b>52,93</b>	<b>69,19</b>

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013  
(dalam ribu)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 229	716	1 945	1 177	648	1 825	1 252	699	1 952
Sumatera Utara	3 562	2 507	6 069	3 553	2 346	5 900	3 572	2 543	6 115
Sumatera Barat	1 321	911	2 232	1 230	776	2 006	1 360	933	2 293
Riau	1 749	863	2 612	1 691	790	2 481	1 755	936	2 692
Jambi	982	535	1 517	941	441	1 382	991	526	1 517
Sumatera Selatan	2 238	1 468	3 705	2 168	1 297	3 465	2 257	1 410	3 666
Bengkulu	534	349	882	502	299	801	533	352	885
Lampung	2 395	1 354	3 749	2 271	1 114	3 385	2 442	1 293	3 735
Kep. Bangka Belitung	424	216	639	411	186	597	426	207	632
Kepulauan Riau	589	311	901	581	268	849	607	303	910
DKI Jakarta	2 948	1 803	4 751	2 956	1 757	4 713	3 019	1 798	4 816
Jawa Barat	12 736	6 366	19 102	12 452	5 962	18 414	12 926	6 223	19 148
Jawa Tengah	9 495	6 558	16 053	9 324	6 640	15 964	9 553	6 731	16 284
DI Yogyakarta	1 047	841	1 888	1 012	835	1 847	1 052	877	1 929
Jawa Timur	11 361	7 779	19 140	11 402	7 864	19 266	11 582	7 796	19 379
Banten	3 215	1 726	4 941	3 085	1 552	4 637	3 204	1 737	4 941
Bali	1 269	1 066	2 335	1 260	1 014	2 274	1 288	1 076	2 364
Nusa Tenggara Barat	1 213	881	2 094	1 147	835	1 982	1 203	849	2 051
Nusa Tenggara Timur	1 233	941	2 174	1 192	884	2 076	1 232	975	2 207
Kalimantan Barat	1 306	836	2 142	1 256	797	2 054	1 323	885	2 208
Kalimantan Tengah	701	397	1 098	703	361	1 064	727	413	1 139
Kalimantan Selatan	1 134	707	1 841	1 122	689	1 811	1 186	735	1 921
Kalimantan Timur	1 209	559	1 768	1 156	468	1 624	1 185	568	1 754
Sulawesi Utara	689	333	1 022	665	282	947	709	348	1 057
Sulawesi Tengah	807	464	1 272	779	397	1 176	797	480	1 277
Sulawesi Selatan	2 167	1 319	3 486	2 093	1 198	3 291	2 180	1 201	3 380
Sulawesi Tenggara	621	416	1 037	602	367	969	635	420	1 055
Gorontalo	311	181	492	297	152	449	307	188	495
Sulawesi Barat	332	244	576	324	200	524	335	231	566
Maluku	402	262	664	378	221	599	409	269	678
Maluku Utara	293	156	449	294	151	445	292	157	449
Papua Barat	228	133	361	229	125	354	235	132	367
Papua	958	690	1 648	962	672	1 634	967	718	1 685
<b>Indonesia</b>	<b>70 697</b>	<b>43 889</b>	<b>114 586</b>	<b>69 216</b>	<b>41 588</b>	<b>110 804</b>	<b>71 540</b>	<b>44 007</b>	<b>115 547</b>

Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)  
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	76,44	43,51	59,78	72,69	39,07	55,68	76,89	41,96	59,22
Sumatera Utara	81,43	55,53	68,28	80,86	51,71	66,05	81,11	55,94	68,32
Sumatera Barat	79,57	52,13	65,49	73,70	44,14	58,54	81,29	52,98	66,76
Riau	83,10	43,61	63,97	79,51	39,49	60,12	81,85	46,44	64,69
Jambi	83,70	47,52	65,99	79,55	38,87	59,63	83,28	46,08	65,06
Sumatera Selatan	81,01	54,62	68,00	77,98	47,95	63,17	80,85	51,92	66,59
Bengkulu	84,29	57,26	71,05	78,78	48,87	64,13	83,41	57,21	70,57
Lampung	84,13	50,46	67,80	79,40	41,30	60,91	85,15	47,84	67,04
Kep. Bangka Belitung	86,40	48,02	68,05	83,05	40,92	62,91	85,37	45,23	66,18
Kepulauan Riau	84,48	46,93	66,18	82,11	39,80	61,48	84,83	44,46	65,15
DKI Jakarta	77,16	48,12	62,78	76,94	46,66	61,95	78,36	47,59	63,13
Jawa Barat	78,58	40,36	59,73	76,33	37,55	57,20	78,91	39,04	59,24
Jawa Tengah	80,77	53,77	67,02	79,09	54,29	66,46	81,01	55,02	67,78
DI Yogyakarta	77,59	59,53	68,36	74,66	58,87	66,58	77,53	61,67	69,42
Jawa Timur	81,23	52,90	66,71	81,21	53,27	66,89	82,40	52,75	67,21
Banten	78,54	43,85	61,54	74,70	39,10	57,25	77,11	43,49	60,63
Bali	83,26	69,85	76,55	82,08	65,93	74,00	83,49	69,65	76,57
Nusa Tenggara Barat	80,55	52,48	65,75	75,79	49,49	61,92	79,31	50,18	63,95
Nusa Tenggara Timur	81,77	59,14	70,15	78,54	55,18	66,54	80,86	60,55	70,43
Kalimantan Barat	83,76	55,89	70,11	80,23	53,08	66,94	84,34	58,80	71,84
Kalimantan Tengah	83,57	52,28	68,69	83,27	47,16	66,10	85,77	53,73	70,54
Kalimantan Selatan	83,38	52,49	68,01	81,96	50,82	66,46	86,29	53,94	70,19
Kalimantan Timur	83,09	43,58	64,58	78,55	36,09	58,66	79,87	43,41	62,78
Sulawesi Utara	80,21	40,11	60,49	77,04	33,77	55,77	81,97	41,53	62,09
Sulawesi Tengah	85,28	51,36	68,71	81,74	43,60	63,11	83,29	52,53	68,27
Sulawesi Selatan	79,63	44,20	61,09	76,57	39,93	57,40	79,55	39,93	58,82
Sulawesi Tenggara	81,82	53,93	67,75	78,88	47,13	62,86	82,69	53,81	68,12
Gorontalo	83,47	47,85	65,55	79,08	40,03	59,44	81,25	49,12	65,08
Sulawesi Barat	84,34	60,62	72,36	81,47	49,40	65,26	83,91	56,58	70,10
Maluku	76,31	49,50	62,89	71,13	41,38	56,24	76,51	50,11	63,29
Maluku Utara	80,51	44,58	62,91	80,17	42,87	61,90	78,99	44,34	62,01
Papua Barat	76,98	51,46	65,11	76,64	48,10	63,34	77,74	50,27	64,96
Papua	84,75	68,56	77,12	84,00	65,92	75,49	83,24	69,40	76,72
<b>Indonesia</b>	<b>80,63</b>	<b>49,89</b>	<b>65,23</b>	<b>78,49</b>	<b>47,01</b>	<b>62,72</b>	<b>80,86</b>	<b>49,58</b>	<b>65,19</b>

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	33,56	34,62	34,38	4,02	5,11	4,06	36,92	37,93	36,40
Sumatera Utara	32,32	36,45	31,11	3,88	3,44	3,61	34,92	31,23	35,04
Sumatera Barat	29,71	31,12	30,05	5,48	4,66	4,75	39,07	40,57	38,92
Riau	40,73	41,34	42,43	4,73	4,83	5,01	32,63	32,98	33,27
Jambi	35,84	37,13	35,66	5,20	4,35	4,39	34,78	38,21	36,56
Sumatera Selatan	29,86	33,30	33,67	2,57	2,70	2,19	37,32	37,21	36,69
Bengkulu	23,37	30,06	25,69	3,48	3,20	2,94	40,76	40,29	39,67
Lampung	25,53	25,75	26,50	3,23	3,47	3,42	37,47	39,29	36,76
Kep. Bangka Belitung	43,11	46,55	42,57	8,11	7,05	8,68	31,86	30,46	34,12
Kepulauan Riau	65,50	68,35	65,38	3,53	4,10	1,55	24,95	20,40	24,08
DKI Jakarta	68,81	67,29	69,10	4,36	3,67	3,49	20,57	20,16	20,28
Jawa Barat	42,54	43,31	43,68	3,78	3,36	3,46	29,14	30,10	29,08
Jawa Tengah	33,05	31,83	33,73	3,46	3,27	3,13	34,66	35,97	34,17
DI Yogyakarta	40,20	39,88	40,26	5,68	4,56	4,00	31,25	32,45	32,51
Jawa Timur	32,08	30,54	31,19	3,70	3,24	3,68	33,84	33,91	33,71
Banten	54,65	57,19	56,05	4,73	3,17	4,08	25,02	24,35	24,92
Bali	39,96	44,39	39,42	3,77	3,76	3,76	32,18	29,06	31,10
Nusa Tenggara Barat	23,31	21,89	22,51	2,84	2,62	2,85	39,23	39,51	40,44
Nusa Tenggara Timur	17,85	19,15	18,36	2,02	1,55	1,51	42,10	46,19	42,58
Kalimantan Barat	31,88	31,38	31,60	2,51	2,64	3,08	37,15	37,03	36,67
Kalimantan Tengah	38,34	38,00	38,32	2,58	3,23	2,54	35,26	37,71	36,46
Kalimantan Selatan	34,09	33,40	34,63	3,23	3,32	2,26	39,72	38,02	39,25
Kalimantan Timur	54,06	52,88	53,31	4,76	3,92	3,68	26,47	29,16	28,11
Sulawesi Utara	35,50	39,94	35,98	3,92	3,58	4,76	38,54	35,03	38,01
Sulawesi Tengah	27,07	29,06	30,62	4,84	3,81	3,15	38,07	40,58	38,10
Sulawesi Selatan	31,82	33,57	33,80	3,74	4,11	3,96	40,58	38,10	40,18
Sulawesi Tenggara	30,53	30,00	29,83	2,94	2,90	3,56	38,89	40,72	39,61
Gorontalo	31,25	32,33	35,53	3,30	3,35	3,84	42,73	42,47	39,01
Sulawesi Barat	21,77	25,03	23,52	1,64	1,76	2,39	45,55	45,38	43,83
Maluku	26,75	31,03	29,14	1,94	2,15	1,73	46,22	42,42	40,81
Maluku Utara	30,84	26,92	29,72	3,54	2,85	2,35	40,66	40,95	42,47
Papua Barat	36,65	36,23	37,47	1,62	2,02	1,10	38,58	38,14	34,62
Papua	18,29	17,51	17,15	1,58	1,25	2,06	41,16	42,79	42,33
<b>Indonesia</b>	<b>36,63</b>	<b>37,03</b>	<b>37,10</b>	<b>3,73</b>	<b>3,39</b>	<b>3,45</b>	<b>33,53</b>	<b>33,73</b>	<b>33,40</b>

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013  
(lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan <sup>*)</sup>		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	5,56	6,00	7,20	19,94	16,34	17,97	62,42	60,27	61,56
Sumatera Utara	6,40	7,60	7,28	22,48	21,28	22,95	63,80	60,11	65,28
Sumatera Barat	9,85	9,65	10,55	15,88	14,00	15,74	64,80	64,22	65,21
Riau	7,64	6,47	5,87	14,27	14,38	13,42	54,55	53,83	52,56
Jambi	6,95	6,70	6,09	17,24	13,61	17,30	58,96	58,52	59,95
Sumatera Selatan	5,31	5,08	4,82	24,94	21,70	22,63	67,56	63,99	64,14
Bengkulu	7,58	6,18	7,78	24,81	20,27	23,91	73,15	66,74	71,37
Lampung	11,60	11,07	11,04	22,17	20,42	22,27	71,24	70,78	70,08
Kep. Bangka Belitung	4,11	4,83	3,91	12,81	11,11	10,72	48,78	46,40	48,75
Kepulauan Riau	1,54	3,00	2,67	4,49	4,16	6,32	30,97	27,55	33,07
DKI Jakarta	2,39	2,44	3,14	3,86	6,43	3,99	26,83	29,04	27,41
Jawa Barat	16,19	14,81	14,67	8,36	8,43	9,12	53,68	53,33	52,86
Jawa Tengah	14,92	12,26	15,00	13,91	16,67	13,96	63,50	64,90	63,14
DI Yogyakarta	8,23	7,08	6,73	14,64	16,03	16,50	54,12	55,56	55,74
Jawa Timur	12,56	12,51	13,15	17,82	19,80	18,27	64,22	66,22	65,13
Banten	8,17	9,75	8,59	7,43	5,53	6,36	40,62	39,64	39,87
Bali	9,18	9,22	9,76	14,91	13,57	15,95	56,27	51,85	56,82
Nusa Tenggara Barat	14,67	19,23	15,58	19,95	16,75	18,62	73,85	75,49	74,64
Nusa Tenggara Timur	4,69	3,11	4,53	33,34	29,99	33,01	80,12	79,29	80,13
Kalimantan Barat	3,99	4,30	4,60	24,47	24,65	24,04	65,61	65,99	65,32
Kalimantan Tengah	4,37	3,62	5,06	19,45	17,44	17,61	59,08	58,77	59,14
Kalimantan Selatan	6,27	7,31	6,13	16,70	17,95	17,74	62,69	63,28	63,12
Kalimantan Timur	3,56	4,64	3,91	11,14	9,40	10,99	41,17	43,20	43,01
Sulawesi Utara	11,56	12,51	11,12	10,49	8,94	10,13	60,58	56,47	59,26
Sulawesi Tengah	8,47	7,19	8,07	21,54	19,37	20,05	68,09	67,13	66,23
Sulawesi Selatan	5,64	5,86	4,65	18,22	18,35	17,41	64,44	62,32	62,24
Sulawesi Tenggara	3,50	4,42	4,31	24,14	21,97	22,69	66,53	67,10	66,61
Gorontalo	10,05	9,31	9,43	12,67	12,55	12,18	65,46	64,33	60,62
Sulawesi Barat	4,90	5,01	4,38	26,14	22,82	25,88	76,60	73,21	74,09
Maluku	1,60	3,22	3,25	23,50	21,18	25,08	71,32	66,82	69,14
Maluku Utara	5,51	5,25	4,01	19,45	24,04	21,45	65,62	70,23	67,93
Papua Barat	1,30	2,07	3,36	21,85	21,54	23,45	61,73	61,75	61,43
Papua	2,20	1,51	1,95	36,77	36,94	36,52	80,13	81,24	80,79
<b>Indonesia</b>	<b>10,36</b>	<b>9,95</b>	<b>10,27</b>	<b>15,75</b>	<b>15,90</b>	<b>15,78</b>	<b>59,64</b>	<b>59,58</b>	<b>59,45</b>

Keterangan: \*) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja  
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	50,80	10,90	38,30	46,53	10,91	42,57	46,74	13,44	39,82
Sumatera Utara	48,62	11,69	39,69	43,45	14,67	41,88	49,19	11,95	38,86
Sumatera Barat	42,07	13,74	44,19	39,34	13,35	47,31	41,49	14,23	44,28
Riau	46,01	11,48	42,51	44,26	14,05	41,69	41,23	13,22	45,55
Jambi	51,90	7,42	40,68	52,37	10,16	37,47	49,24	8,30	42,46
Sumatera Selatan	55,53	11,98	32,49	54,69	10,43	34,88	52,38	11,83	35,79
Bengkulu	59,41	7,36	33,23	52,16	9,07	38,77	57,86	9,02	33,12
Lampung	52,17	11,43	36,40	51,46	13,24	35,29	50,26	13,74	36,00
Kep. Bangka Belitung	24,13	33,17	42,70	28,06	32,68	39,26	25,95	31,79	42,25
Kepulauan Riau	13,23	32,19	54,59	10,15	37,70	52,15	12,60	38,51	48,89
DKI Jakarta	1,43	17,38	81,19	0,33	18,77	80,90	1,89	17,39	80,72
Jawa Barat	21,27	28,13	50,60	19,93	29,24	50,83	19,34	30,67	50,00
Jawa Tengah	30,52	28,39	41,09	30,86	25,57	43,57	30,03	29,84	40,14
DI Yogyakarta	23,00	20,88	56,12	27,86	19,76	52,37	24,20	21,35	54,44
Jawa Timur	38,47	21,42	40,11	37,44	20,61	41,95	37,94	22,02	40,04
Banten	15,48	27,20	57,31	14,99	32,49	52,52	14,17	29,62	56,21
Bali	25,31	22,20	52,49	24,00	24,18	51,81	23,00	25,04	51,97
Nusa Tenggara Barat	45,34	13,08	41,58	45,02	15,23	39,75	40,66	16,87	42,48
Nusa Tenggara Timur	66,38	8,57	25,05	60,90	12,11	26,99	62,40	11,31	26,29
Kalimantan Barat	57,86	12,13	30,00	57,57	12,98	29,45	56,96	12,73	30,31
Kalimantan Tengah	53,14	13,80	33,06	52,70	14,66	32,64	52,79	13,73	33,48
Kalimantan Selatan	37,74	20,84	41,41	40,22	17,41	42,37	35,98	23,58	40,44
Kalimantan Timur	26,13	20,95	52,92	26,61	23,09	50,30	26,39	22,66	50,94
Sulawesi Utara	33,77	16,47	49,77	34,23	15,93	49,84	33,63	17,08	49,29
Sulawesi Tengah	50,45	12,92	36,63	49,25	12,48	38,27	45,21	15,62	39,17
Sulawesi Selatan	41,78	12,94	45,29	43,39	12,71	43,90	40,29	14,53	45,17
Sulawesi Tenggara	43,27	12,95	43,77	41,53	14,54	43,94	40,77	13,44	45,78
Gorontalo	34,84	15,56	49,60	36,66	16,59	46,75	32,22	13,92	53,86
Sulawesi Barat	59,93	10,15	29,91	57,55	10,04	32,40	58,96	11,31	29,74
Maluku	51,28	9,85	38,87	48,07	10,05	41,88	52,05	10,80	37,15
Maluku Utara	48,91	12,05	39,04	54,31	9,20	36,49	51,75	9,87	38,38
Papua Barat	48,05	8,79	43,16	48,71	10,25	41,04	48,41	12,53	39,06
Papua	73,78	3,64	22,57	72,90	5,14	21,96	73,33	5,15	21,52
<b>Indonesia</b>	<b>35,43</b>	<b>20,14</b>	<b>44,43</b>	<b>34,36</b>	<b>20,60</b>	<b>45,04</b>	<b>34,19</b>	<b>21,60</b>	<b>44,21</b>



Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	564	529	563	29,01	28,98	28,85	54,41	53,55	53,17
Sumatera Utara	1 226	1 193	1 606	20,19	20,23	26,26	58,63	54,70	57,51
Sumatera Barat	498	628	624	22,31	31,31	27,22	56,36	49,95	56,38
Riau	730	695	737	27,94	28,02	27,37	50,21	46,29	52,07
Jambi	498	563	566	32,80	40,74	37,33	47,57	38,09	45,94
Sumatera Selatan	856	1 295	1 122	23,10	37,38	30,61	53,91	46,79	52,03
Bengkulu	200	267	237	22,65	33,29	26,76	56,28	48,17	57,21
Lampung	859	1 255	1 188	22,92	37,08	31,82	50,17	40,79	48,35
Kep. Bangka Belitung	124	172	139	19,44	28,78	22,06	56,54	41,83	52,80
Kepulauan Riau	123	107	129	13,64	12,65	14,22	53,84	54,49	51,20
DKI Jakarta	349	346	451	7,34	7,34	9,37	59,11	56,34	54,81
Jawa Barat	2 660	2 840	2 985	13,92	15,42	15,59	52,16	50,28	57,42
Jawa Tengah	2 762	3 561	3 243	17,21	22,30	19,91	56,83	54,16	60,96
DI Yogyakarta	406	584	432	21,50	31,62	22,41	63,71	55,92	63,18
Jawa Timur	3 837	4 400	4 647	20,05	22,84	23,98	59,57	55,25	60,11
Banten	543	512	638	11,00	11,04	12,91	63,23	54,63	58,36
Bali	485	541	558	20,78	23,79	23,60	58,12	56,11	58,71
Nusa Tenggara Barat	468	431	404	22,36	21,72	19,70	61,20	51,33	54,55
Nusa Tenggara Timur	799	847	848	36,76	40,81	38,40	58,89	56,17	58,62
Kalimantan Barat	691	679	729	32,26	33,04	33,03	58,48	54,06	57,94
Kalimantan Tengah	275	333	304	25,08	31,28	26,67	58,52	49,54	55,14
Kalimantan Selatan	409	605	588	22,19	33,38	30,62	55,75	50,92	55,16
Kalimantan Timur	236	237	267	13,36	14,62	15,21	55,33	47,74	61,25
Sulawesi Utara	181	199	214	17,76	20,97	20,27	49,34	42,63	53,67
Sulawesi Tengah	343	399	324	27,00	33,94	25,35	57,57	44,14	61,82
Sulawesi Selatan	861	1 137	1 036	24,69	34,55	30,66	52,25	45,27	47,50
Sulawesi Tenggara	289	345	326	27,86	35,63	30,92	59,45	49,67	57,88
Gorontalo	107	117	99	21,81	26,15	19,94	57,47	49,46	56,54
Sulawesi Barat	233	264	246	40,44	50,45	43,40	53,61	43,25	54,85
Maluku	192	145	177	28,89	24,23	26,11	60,09	57,13	57,29
Maluku Utara	108	134	128	24,08	30,08	28,46	54,19	49,97	49,93
Papua Barat	86	94	106	23,88	26,69	28,89	61,88	53,39	54,64
Papua	466	462	483	28,26	28,27	28,69	52,29	51,99	54,29
<b>Indonesia</b>	<b>22 465</b>	<b>25 916</b>	<b>26 145</b>	<b>19,61</b>	<b>23,39</b>	<b>22,63</b>	<b>56,23</b>	<b>51,18</b>	<b>56,70</b>

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2,31	5,62	1,81	7,42	10,34	7,75	18,65	19,54	16,68
Sumatera Utara	1,68	3,15	1,99	6,08	5,39	5,85	13,42	11,75	14,99
Sumatera Barat	1,61	10,85	2,67	7,09	11,10	9,25	15,07	17,88	13,45
Riau	1,77	4,43	1,71	6,99	8,82	8,23	14,48	14,41	12,33
Jambi	1,99	11,63	1,77	5,98	15,14	6,90	15,92	19,31	19,94
Sumatera Selatan	1,92	6,97	2,10	5,49	9,90	5,32	13,73	20,79	15,18
Bengkulu	2,57	8,45	3,92	6,57	10,81	7,59	11,42	16,64	13,17
Lampung	1,68	8,78	1,59	6,91	13,19	6,80	16,21	18,42	16,78
Kep. Bangka Belitung	3,26	7,83	4,41	4,69	8,22	3,86	8,78	16,26	10,45
Kepulauan Riau	2,75	3,56	1,88	3,66	4,08	3,88	5,56	5,89	6,03
DKI Jakarta	0,59	4,31	0,89	2,13	2,61	2,41	4,44	3,74	5,92
Jawa Barat	1,29	7,04	1,56	3,97	5,42	4,14	9,13	11,07	9,79
Jawa Tengah	2,02	9,93	2,05	5,24	8,30	5,30	9,80	12,85	9,84
DI Yogyakarta	1,35	7,20	1,58	6,93	13,32	6,89	7,70	13,37	8,43
Jawa Timur	1,10	4,74	1,48	6,82	7,75	6,18	11,62	12,80	12,14
Banten	1,21	5,76	1,30	3,44	4,11	3,48	7,92	7,29	8,03
Bali	1,06	4,50	1,11	4,33	5,65	5,16	9,05	9,38	8,96
Nusa Tenggara Barat	2,21	5,03	3,06	9,01	11,45	10,54	15,54	18,16	13,38
Nusa Tenggara Timur	2,33	3,32	2,59	10,37	11,46	8,60	18,73	18,96	17,06
Kalimantan Barat	0,90	4,81	1,01	3,45	7,91	4,96	18,45	20,76	22,71
Kalimantan Tengah	1,44	4,39	1,39	6,55	7,76	8,25	12,08	16,31	13,71
Kalimantan Selatan	2,25	5,53	3,34	6,17	9,18	7,08	15,24	16,36	16,77
Kalimantan Timur	1,52	2,61	2,00	3,45	2,96	3,06	7,43	7,92	7,23
Sulawesi Utara	1,01	3,33	2,87	5,31	5,15	5,32	10,79	12,63	11,19
Sulawesi Tengah	3,14	8,99	2,85	8,28	11,62	8,56	11,86	18,59	12,38
Sulawesi Selatan	2,40	5,05	3,35	8,99	11,75	10,67	16,05	17,74	15,45
Sulawesi Tenggara	3,46	8,49	3,01	8,22	14,24	8,91	15,16	18,72	16,50
Gorontalo	2,44	6,09	3,77	5,45	6,90	5,04	11,39	12,97	10,51
Sulawesi Barat	4,25	10,64	4,11	18,18	23,92	19,32	20,15	25,69	19,24
Maluku	2,91	2,97	2,96	6,17	7,62	6,97	14,90	14,19	14,72
Maluku Utara	2,39	5,04	1,85	6,41	8,39	7,91	16,89	16,32	17,52
Papua Barat	2,93	3,71	1,85	4,68	5,20	5,25	14,27	14,07	15,37
Papua	0,45	0,77	1,00	6,02	5,69	6,06	16,14	14,30	16,63
<b>Indonesia</b>	<b>1,60</b>	<b>6,27</b>	<b>1,86</b>	<b>5,72</b>	<b>7,77</b>	<b>5,86</b>	<b>11,58</b>	<b>13,27</b>	<b>12,03</b>

\*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja  
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013  
(lanjutan)

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	19,37	17,65	19,08	12,97	11,29	12,15	20,71	18,79	23,12
Sumatera Utara	16,57	11,74	15,39	12,07	14,21	12,91	28,54	33,23	26,95
Sumatera Barat	15,45	14,37	15,60	11,38	8,39	10,73	25,79	18,37	24,24
Riau	16,15	14,15	13,99	10,58	9,44	10,18	25,90	24,21	26,58
Jambi	23,56	15,40	21,14	14,40	9,55	12,59	20,71	15,24	20,30
Sumatera Selatan	17,87	16,59	19,36	13,00	10,16	11,87	26,81	19,30	22,09
Bengkulu	12,55	15,40	15,57	13,44	8,97	12,57	24,95	20,11	27,09
Lampung	14,68	15,15	16,38	9,12	7,37	12,56	24,71	18,96	23,26
Kep. Bangka Belitung	14,06	13,22	14,49	8,70	8,27	10,38	33,89	27,47	34,65
Kepulauan Riau	8,50	5,72	8,00	6,39	5,74	7,90	42,07	41,97	39,56
DKI Jakarta	4,48	4,11	4,98	4,40	6,49	4,04	47,71	47,60	52,59
Jawa Barat	11,96	9,47	10,84	8,89	8,80	9,13	34,99	32,38	37,33
Jawa Tengah	12,53	10,25	11,64	8,96	11,88	9,35	31,18	25,56	32,40
DI Yogyakarta	11,76	13,02	11,14	10,47	8,65	9,14	33,99	24,29	34,25
Jawa Timur	13,88	12,34	13,66	10,44	11,66	10,29	28,13	27,72	29,35
Banten	8,54	8,38	8,33	6,53	7,01	6,26	45,43	43,67	50,04
Bali	11,47	11,80	12,31	8,88	8,37	9,44	27,44	28,56	28,72
Nusa Tenggara Barat	13,48	17,05	14,39	10,11	9,98	10,59	23,89	18,70	21,59
Nusa Tenggara Timur	18,41	20,75	21,32	12,25	12,59	13,23	24,22	21,29	23,47
Kalimantan Barat	19,35	14,98	15,70	11,85	9,97	10,80	27,99	24,16	25,95
Kalimantan Tengah	17,65	16,27	16,11	11,31	10,15	9,57	26,54	23,27	26,44
Kalimantan Selatan	15,52	16,46	16,59	12,37	10,94	11,12	26,66	21,64	26,50
Kalimantan Timur	9,57	9,59	10,45	11,89	9,69	12,63	30,49	26,88	28,86
Sulawesi Utara	11,83	12,74	12,33	11,37	9,33	11,55	35,70	33,49	36,69
Sulawesi Tengah	18,51	16,00	13,90	13,61	9,54	12,15	23,26	20,07	25,77
Sulawesi Selatan	15,85	14,58	15,01	11,67	9,22	11,18	20,99	22,91	21,59
Sulawesi Tenggara	16,30	16,04	15,82	11,36	7,55	11,71	20,56	16,65	19,98
Gorontalo	12,41	13,13	11,69	10,91	10,25	13,26	25,57	21,66	22,47
Sulawesi Barat	17,31	14,44	18,76	8,60	6,48	10,28	16,01	10,28	16,42
Maluku	18,39	15,72	16,79	13,36	14,44	13,03	24,46	20,97	27,35
Maluku Utara	18,05	17,46	17,40	14,45	12,98	14,07	26,20	22,57	24,03
Papua Barat	15,39	19,33	17,45	12,29	12,16	12,04	28,58	22,50	26,48
Papua	24,26	25,96	23,07	17,95	17,17	16,79	23,01	23,91	22,01
<b>Indonesia</b>	<b>13,72</b>	<b>12,18</b>	<b>13,29</b>	<b>10,09</b>	<b>10,24</b>	<b>10,15</b>	<b>30,40</b>	<b>27,91</b>	<b>31,25</b>

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja  
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013  
(lanjutan)

Provinsi	49–59 jam			60 jam keatas		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	11,01	9,44	11,76	7,54	7,33	7,66
Sumatera Utara	10,61	11,65	10,80	11,03	8,88	11,13
Sumatera Barat	13,73	10,51	14,59	9,87	8,53	9,47
Riau	11,97	12,69	14,68	12,16	11,85	12,29
Jambi	10,10	8,11	9,45	7,33	5,60	7,91
Sumatera Selatan	12,51	9,07	13,26	8,67	7,21	10,83
Bengkulu	19,06	11,10	13,97	9,44	8,52	6,12
Lampung	18,52	12,55	15,09	8,17	5,59	7,54
Kep. Bangka Belitung	18,03	10,88	15,75	8,59	7,84	6,00
Kepulauan Riau	18,87	17,39	17,12	12,21	15,65	15,62
DKI Jakarta	16,66	14,10	12,44	19,58	17,03	16,73
Jawa Barat	15,78	14,09	14,00	13,98	11,73	13,21
Jawa Tengah	18,36	13,36	18,82	11,92	7,87	10,60
DI Yogyakarta	17,64	12,15	19,45	10,17	8,00	9,13
Jawa Timur	17,05	14,34	16,25	10,96	8,65	10,64
Banten	14,55	12,46	12,53	12,38	11,33	10,03
Bali	21,42	17,67	17,85	16,36	14,07	16,45
Nusa Tenggara Barat	16,80	12,93	17,28	8,96	6,69	9,17
Nusa Tenggara Timur	7,88	6,08	8,10	5,81	5,56	5,64
Kalimantan Barat	11,34	10,42	11,21	6,66	7,00	7,67
Kalimantan Tengah	11,96	11,84	13,55	12,47	10,02	10,98
Kalimantan Selatan	12,90	11,26	10,85	8,89	8,64	7,75
Kalimantan Timur	16,73	18,81	17,19	18,91	21,54	18,58
Sulawesi Utara	12,45	12,28	11,03	11,53	11,05	9,01
Sulawesi Tengah	13,09	8,23	16,23	8,25	6,96	8,16
Sulawesi Selatan	14,94	11,11	14,00	9,09	7,63	8,75
Sulawesi Tenggara	15,07	11,03	15,15	9,87	7,28	8,91
Gorontalo	18,40	16,12	16,42	13,42	12,87	16,84
Sulawesi Barat	10,55	4,83	8,99	4,95	3,72	2,89
Maluku	10,09	12,05	9,62	9,71	12,03	8,56
Maluku Utara	9,74	9,85	10,57	5,87	7,39	6,63
Papua Barat	13,12	10,67	12,03	8,74	12,38	9,53
Papua	6,27	6,27	6,63	5,91	5,94	7,81
<b>Indonesia</b>	<b>15,38</b>	<b>12,79</b>	<b>14,63</b>	<b>11,51</b>	<b>9,57</b>	<b>10,92</b>

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013

Provinsi	Formal			Informal		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	41,09	43,45	42,26	58,91	56,55	57,74
Sumatera Utara	41,12	45,75	39,46	58,88	54,25	60,54
Sumatera Barat	41,78	43,39	41,55	58,22	56,61	58,45
Riau	50,08	50,99	52,14	49,92	49,01	47,86
Jambi	45,86	45,61	44,65	54,14	54,39	55,35
Sumatera Selatan	36,57	39,76	40,34	63,43	60,24	59,66
Bengkulu	32,53	38,34	33,96	67,47	61,66	66,04
Lampung	35,01	34,99	36,31	64,99	65,01	63,69
Kep. Bangka Belitung	57,27	58,92	56,66	42,73	41,08	43,34
Kepulauan Riau	71,72	74,65	70,32	28,28	25,35	29,68
DKI Jakarta	78,74	77,60	77,38	21,26	22,40	22,62
Jawa Barat	52,80	54,85	53,66	47,20	45,15	46,34
Jawa Tengah	43,83	44,71	44,17	56,17	55,29	55,83
DI Yogyakarta	56,23	52,64	53,94	43,77	47,36	46,06
Jawa Timur	42,45	42,46	42,07	57,55	57,54	57,93
Banten	64,51	65,48	64,70	35,49	34,52	35,30
Bali	51,70	55,60	52,41	48,30	44,40	47,59
Nusa Tenggara Barat	34,34	31,80	33,01	65,66	68,20	66,99
Nusa Tenggara Timur	22,38	24,02	23,21	77,62	75,98	76,79
Kalimantan Barat	38,22	37,15	38,88	61,78	62,85	61,12
Kalimantan Tengah	46,00	45,39	45,63	54,00	54,61	54,37
Kalimantan Selatan	43,63	43,08	44,00	56,37	56,92	56,00
Kalimantan Timur	63,48	61,61	62,00	36,52	38,39	38,00
Sulawesi Utara	43,10	46,72	43,99	56,90	53,28	56,01
Sulawesi Tengah	37,87	38,31	40,03	62,13	61,69	59,97
Sulawesi Selatan	42,85	43,46	45,06	57,15	56,54	54,94
Sulawesi Tenggara	40,58	39,57	39,54	59,42	60,43	60,46
Gorontalo	41,06	41,29	45,78	58,94	58,71	54,22
Sulawesi Barat	30,23	32,60	30,47	69,77	67,40	69,53
Maluku	33,66	36,51	34,37	66,34	63,49	65,63
Maluku Utara	37,06	33,09	35,42	62,94	66,91	64,58
Papua Barat	42,32	43,08	43,25	57,68	56,92	56,75
Papua	21,66	21,28	21,19	78,34	78,72	78,81
<b>Indonesia</b>	<b>46,44</b>	<b>47,42</b>	<b>46,69</b>	<b>53,56</b>	<b>52,58</b>	<b>53,31</b>

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013  
(persen)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,38	10,16	7,81	9,06	12,47	10,30	7,67	8,88	8,11
Sumatera Utara	4,83	7,52	5,96	5,66	7,82	6,53	5,30	7,30	6,14
Sumatera Barat	6,04	7,14	6,49	6,92	7,10	6,99	5,37	6,80	5,96
Riau	4,05	8,17	5,45	4,51	7,57	5,50	4,54	5,45	4,86
Jambi	2,87	3,21	2,99	4,07	6,46	4,84	2,60	2,70	2,63
Sumatera Selatan	4,39	7,04	5,46	5,32	4,47	5,00	4,22	3,95	4,12
Bengkulu	2,64	2,36	2,53	4,25	5,56	4,74	2,67	3,12	2,85
Lampung	3,38	7,46	4,90	5,10	7,35	5,85	3,89	7,11	5,03
Kep. Bangka Belitung	1,33	2,48	1,72	3,22	4,73	3,70	2,15	3,62	2,63
Kepulauan Riau	2,90	10,32	5,60	4,02	10,76	6,25	2,22	7,43	4,02
DKI Jakarta	8,72	11,13	9,65	8,55	9,79	9,02	8,39	10,00	9,00
Jawa Barat	8,56	8,35	8,49	8,79	10,12	9,22	8,20	10,09	8,83
Jawa Tengah	5,24	5,66	5,42	6,08	5,94	6,02	5,88	5,83	5,86
DI Yogyakarta	1,96	2,88	2,37	3,69	2,91	3,34	2,62	3,71	3,12
Jawa Timur	3,87	4,18	4,00	4,48	4,11	4,33	3,29	5,03	4,00
Banten	9,72	9,84	9,76	10,03	9,62	9,90	9,89	8,96	9,57
Bali	1,99	1,80	1,90	2,15	1,35	1,79	2,16	1,26	1,75
Nusa Tenggara Barat	4,91	6,03	5,39	5,93	4,62	5,38	4,79	4,09	4,50
Nusa Tenggara Timur	2,85	3,27	3,03	2,70	3,78	3,16	2,22	3,38	2,74
Kalimantan Barat	3,31	4,40	3,74	4,17	3,82	4,03	2,36	2,28	2,33
Kalimantan Tengah	3,10	3,46	3,23	2,80	3,65	3,09	1,78	4,14	2,65
Kalimantan Selatan	3,96	4,36	4,12	3,91	3,60	3,79	3,49	3,50	3,49
Kalimantan Timur	8,36	8,66	8,46	7,38	9,65	8,04	8,14	7,70	8,00
Sulawesi Utara	5,17	11,32	7,27	5,28	9,81	6,68	4,70	9,53	6,35
Sulawesi Tengah	2,61	2,65	2,63	3,96	4,86	4,27	3,23	2,83	3,08
Sulawesi Selatan	3,86	6,83	5,01	4,85	5,54	5,10	3,88	6,80	4,94
Sulawesi Tenggara	3,28	2,86	3,11	3,63	5,80	4,46	1,91	3,69	2,63
Gorontalo	2,54	4,90	3,42	3,51	5,28	4,12	2,34	4,23	3,06
Sulawesi Barat	1,94	2,11	2,02	2,35	2,30	2,33	1,35	1,68	1,49
Maluku	5,14	8,09	6,33	8,55	11,73	9,75	5,12	9,98	7,11
Maluku Utara	3,62	10,22	6,02	2,59	6,25	3,86	5,31	8,18	6,34
Papua Barat	5,05	3,86	4,62	4,37	5,08	4,62	4,71	4,83	4,75
Papua	2,95	2,90	2,93	3,01	3,54	3,23	3,51	2,99	3,29
<b>Indonesia</b>	<b>5,49</b>	<b>6,32</b>	<b>5,81</b>	<b>6,09</b>	<b>6,52</b>	<b>6,25</b>	<b>5,42</b>	<b>6,33</b>	<b>5,77</b>

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013  
(persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	5,62	9,06	4,45	10,85	16,21	13,83	10,30	10,29	10,24
Sumatera Utara	4,66	5,66	4,73	8,48	9,92	9,20	5,45	8,44	3,93
Sumatera Barat	5,46	6,92	5,17	8,30	11,71	7,31	7,27	7,91	6,56
Riau	3,80	4,51	2,75	7,70	9,25	6,91	7,75	6,46	9,00
Jambi	1,85	4,07	1,54	4,26	9,12	4,36	6,45	4,48	4,64
Sumatera Selatan	4,39	5,32	1,81	8,54	10,06	8,70	5,22	8,91	7,81
Bengkulu	1,17	4,25	1,41	4,41	8,04	5,43	6,38	5,72	4,66
Lampung	3,67	5,10	3,15	8,52	11,30	9,54	4,64	7,52	6,93
Kep. Bangka Belitung	1,32	3,22	1,35	1,41	7,25	5,95	6,44	3,71	1,72
Kepulauan Riau	4,51	4,02	3,04	6,97	7,87	4,95	5,37	3,68	5,12
DKI Jakarta	10,02	8,55	9,42	11,45	10,90	10,10	5,69	5,10	6,43
Jawa Barat	8,03	8,79	7,78	10,12	12,61	11,58	7,17	5,52	8,40
Jawa Tengah	4,80	6,08	5,27	7,84	10,80	8,38	4,67	4,42	4,47
DI Yogyakarta	1,36	3,69	1,15	2,32	5,96	4,19	5,15	4,19	6,30
Jawa Timur	3,42	4,48	2,90	6,33	8,77	7,53	2,78	3,53	3,47
Banten	9,99	10,03	11,60	12,39	12,74	9,26	2,92	5,62	1,81
Bali	1,75	2,15	0,46	2,59	2,89	2,87	0,98	2,72	4,85
Nusa Tenggara Barat	4,70	5,93	2,15	7,02	11,59	10,21	6,76	6,79	7,13
Nusa Tenggara Timur	2,24	2,70	1,33	7,45	7,47	9,32	2,75	7,79	3,39
Kalimantan Barat	2,79	4,17	1,43	6,41	9,00	4,99	6,36	4,73	4,55
Kalimantan Tengah	3,25	2,80	2,26	3,65	6,57	3,12	2,19	6,06	4,19
Kalimantan Selatan	3,80	3,91	2,90	6,50	7,39	6,25	1,55	2,67	2,05
Kalimantan Timur	8,82	7,38	6,61	8,62	10,37	9,79	6,60	5,78	8,12
Sulawesi Utara	5,68	5,28	4,75	10,87	10,75	8,39	5,67	5,63	8,91
Sulawesi Tengah	1,39	3,96	1,21	5,80	7,15	7,09	3,29	4,81	4,79
Sulawesi Selatan	4,30	4,85	3,54	8,32	9,29	7,14	2,42	6,50	7,04
Sulawesi Tenggara	1,39	3,63	1,07	5,55	8,53	4,56	6,27	5,53	5,55
Gorontalo	2,79	3,51	1,39	7,43	9,57	7,11	0,96	9,19	6,90
Sulawesi Barat	1,55	2,35	0,46	3,59	4,81	2,80	2,65	2,65	7,00
Maluku	3,26	8,55	3,66	12,75	17,16	11,94	5,34	14,75	13,79
Maluku Utara	1,41	2,59	2,72	15,55	6,19	11,37	5,06	7,12	12,74
Papua Barat	3,02	4,37	1,63	9,03	8,23	11,47	1,06	6,42	4,63
Papua	0,97	3,01	1,91	9,04	8,43	6,76	8,07	8,99	9,32
<b>Indonesia</b>	<b>4,94</b>	<b>6,09</b>	<b>4,57</b>	<b>8,33</b>	<b>10,27</b>	<b>8,65</b>	<b>4,99</b>	<b>5,65</b>	<b>5,83</b>

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	40,94	37,03	30,81	41,94	49,69	53,22	17,12	13,29	15,97
Sumatera Utara	45,97	37,04	44,80	45,79	51,89	49,59	8,25	11,06	5,61
Sumatera Barat	49,89	39,05	51,22	37,00	47,33	34,97	13,11	13,62	13,82
Riau	40,32	36,66	31,17	43,84	50,96	47,59	15,84	12,38	21,23
Jambi	39,09	41,05	36,54	36,90	48,70	42,36	24,02	10,25	21,10
Sumatera Selatan	54,64	32,16	28,83	37,91	49,58	55,55	7,45	18,26	15,62
Bengkulu	29,50	38,83	30,95	46,34	47,72	53,02	24,16	13,44	16,03
Lampung	52,00	42,22	42,31	41,70	47,23	47,16	6,29	10,55	10,53
Kep. Bangka Belitung	50,56	40,63	33,37	21,67	50,43	61,50	27,77	8,95	5,12
Kepulauan Riau	37,37	33,10	38,12	48,97	59,78	41,76	13,66	7,12	20,13
DKI Jakarta	33,95	33,30	34,73	52,35	55,86	48,28	13,70	10,84	16,99
Jawa Barat	62,65	60,78	57,68	30,27	34,35	34,28	7,08	4,87	8,04
Jawa Tengah	64,42	58,20	65,50	29,72	36,83	29,40	5,86	4,97	5,10
DI Yogyakarta	27,95	21,11	17,34	32,06	60,78	48,81	39,99	18,11	33,85
Jawa Timur	59,46	48,57	49,77	34,45	45,74	42,69	6,09	5,69	7,54
Banten	59,55	52,64	66,74	36,55	41,20	30,75	3,90	6,15	2,50
Bali	52,28	25,82	14,83	40,89	52,42	50,91	6,82	21,77	34,25
Nusa Tenggara Barat	60,71	43,55	32,27	28,22	43,17	54,20	11,07	13,28	13,53
Nusa Tenggara Timur	58,31	40,87	37,36	35,92	40,58	53,83	5,77	18,55	8,81
Kalimantan Barat	55,07	46,79	45,14	32,46	45,13	39,78	12,46	8,08	15,08
Kalimantan Tengah	70,77	34,09	57,09	22,77	48,27	27,71	6,46	17,64	15,19
Kalimantan Selatan	67,86	53,14	59,11	29,11	40,59	35,66	3,03	6,27	5,23
Kalimantan Timur	51,71	44,07	41,03	38,03	47,09	45,97	10,27	8,84	13,01
Sulawesi Utara	46,40	36,22	43,19	45,69	53,56	41,10	7,91	10,22	15,71
Sulawesi Tengah	34,75	46,38	25,11	51,36	40,72	58,57	13,89	12,90	16,32
Sulawesi Selatan	54,28	35,53	43,37	39,39	46,15	36,97	6,33	18,32	19,66
Sulawesi Tenggara	27,32	31,62	24,11	42,49	51,88	46,20	30,19	16,50	29,69
Gorontalo	58,05	32,58	31,79	38,87	44,73	39,69	3,08	22,69	28,51
Sulawesi Barat	57,19	47,45	21,94	33,66	41,21	39,26	9,15	11,35	38,80
Maluku	30,31	21,85	31,56	60,02	57,12	44,32	9,67	21,02	24,12
Maluku Utara	13,58	34,44	25,87	75,92	43,51	46,25	10,51	22,05	27,88
Papua Barat	38,06	27,29	20,16	59,28	53,99	66,28	2,66	18,72	13,55
Papua	24,73	32,50	43,68	55,75	48,50	35,62	19,51	19,00	20,70
<b>Indonesia</b>	<b>54,99</b>	<b>48,39</b>	<b>50,49</b>	<b>36,52</b>	<b>43,11</b>	<b>39,39</b>	<b>8,49</b>	<b>8,50</b>	<b>10,12</b>



## Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	54,68	61,35	54,47	35,16	29,12	31,03	10,16	9,53	14,49
Sumatera Utara	63,36	58,63	53,97	31,34	34,21	37,82	5,30	7,16	8,21
Sumatera Barat	70,79	64,76	60,46	23,79	26,02	28,15	5,42	9,21	11,40
Riau	66,33	67,35	64,94	23,82	26,30	26,68	9,85	6,35	8,37
Jambi	64,64	69,05	63,51	26,06	25,07	24,60	9,30	5,87	11,89
Sumatera Selatan	72,44	68,68	70,49	23,03	26,16	22,44	4,54	5,16	7,07
Bengkulu	72,68	66,73	68,56	16,86	27,25	25,12	10,46	6,02	6,32
Lampung	76,20	70,91	68,47	22,32	24,50	27,36	1,49	4,59	4,17
Kep. Bangka Belitung	74,11	72,02	81,31	22,87	24,18	10,15	3,02	3,80	8,54
Kepulauan Riau	74,15	68,94	61,52	25,85	30,75	37,24	0,00	0,31	1,24
DKI Jakarta	42,29	40,02	50,94	37,22	44,18	34,06	20,50	15,80	15,00
Jawa Barat	81,50	83,73	81,01	13,37	12,42	13,38	5,13	3,85	5,61
Jawa Tengah	82,43	79,88	80,10	14,12	16,43	14,47	3,45	3,69	5,43
DI Yogyakarta	53,65	54,80	47,54	33,16	37,87	36,34	13,18	7,34	16,12
Jawa Timur	81,41	80,44	81,01	14,99	16,22	14,11	3,60	3,34	4,88
Banten	81,48	77,00	77,26	13,15	16,53	17,72	5,37	6,47	5,02
Bali	67,38	58,22	83,58	23,87	33,80	11,06	8,75	7,98	5,36
Nusa Tenggara Barat	73,59	78,25	78,61	18,62	16,53	15,10	7,79	5,22	6,29
Nusa Tenggara Timur	80,88	72,72	81,41	15,56	21,74	14,24	3,55	5,54	4,35
Kalimantan Barat	73,16	78,90	77,34	20,27	16,94	14,39	6,57	4,15	8,28
Kalimantan Tengah	65,67	71,18	59,36	29,17	23,58	34,30	5,16	5,23	6,35
Kalimantan Selatan	82,72	75,06	79,69	14,22	18,58	16,93	3,06	6,36	3,38
Kalimantan Timur	60,33	60,90	49,71	34,75	31,99	36,67	4,93	7,11	13,62
Sulawesi Utara	62,84	62,87	64,95	34,48	31,90	31,59	2,67	5,24	3,46
Sulawesi Tengah	75,92	69,05	71,52	16,64	22,26	20,59	7,44	8,69	7,89
Sulawesi Selatan	64,53	61,10	57,00	25,82	28,73	29,58	9,65	10,16	13,42
Sulawesi Tenggara	59,45	58,41	41,76	26,29	30,39	34,47	14,26	11,21	23,76
Gorontalo	81,53	82,53	82,36	14,77	15,57	15,28	3,70	1,89	2,36
Sulawesi Barat	70,92	68,23	75,36	21,93	24,73	19,51	7,15	7,04	5,13
Maluku	55,55	62,41	66,18	34,22	32,60	27,73	10,23	4,99	6,09
Maluku Utara	61,71	66,24	61,75	29,16	25,94	28,41	9,13	7,82	9,84
Papua Barat	69,02	61,98	69,22	23,81	23,38	21,64	7,16	14,64	9,14
Papua	89,26	89,78	89,26	9,64	8,64	9,16	1,10	1,57	1,57
<b>Indonesia</b>	<b>75,28</b>	<b>74,77</b>	<b>73,04</b>	<b>19,38</b>	<b>20,02</b>	<b>20,00</b>	<b>5,34</b>	<b>5,21</b>	<b>6,96</b>

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja  
Menurut Provinsi, 2013  
(dalam ribu)

<b>Provinsi</b>	<b>Mei</b>	<b>Agustus</b>	<b>November</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 144	1 243	1 172
Sumatera Utara	2 435	2 620	2 435
Sumatera Barat	1 021	1 270	996
Riau	1 321	1 502	1 332
Jambi	735	866	774
Sumatera Selatan	1 530	1 837	1 682
Bengkulu	337	408	343
Lampung	1 588	1 962	1 638
Kep. Bangka Belitung	289	329	306
Kepulauan Riau	407	475	448
DKI Jakarta	2 309	2 428	2 336
Jawa Barat	11 105	11 907	11 319
Jawa Tengah	6 980	7 033	6 728
DI Yogyakarta	828	863	788
Jawa Timur	8 755	8 664	8 649
Banten	2 554	2 954	2 686
Bali	670	758	681
Nusa Tenggara Barat	972	1 106	1 060
Nusa Tenggara Timur	857	976	865
Kalimantan Barat	830	928	813
Kalimantan Tengah	464	511	445
Kalimantan Selatan	787	842	746
Kalimantan Timur	807	1 003	887
Sulawesi Utara	587	683	574
Sulawesi Tengah	545	635	553
Sulawesi Selatan	2 036	2 266	2 191
Sulawesi Tenggara	460	527	465
Gorontalo	241	287	250
Sulawesi Barat	208	266	233
Maluku	347	401	342
Maluku Utara	236	256	245
Papua Barat	176	188	180
Papua	439	476	454
<b>Indonesia</b>	<b>53 999</b>	<b>58 469</b>	<b>54 614</b>

Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013  
(persen)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	18,36	51,57	35,16	20,07	55,37	37,93	16,72	53,95	35,56
Sumatera Utara	14,43	39,95	27,40	14,29	43,90	29,33	14,35	39,66	27,20
Sumatera Barat	15,32	43,86	29,96	20,81	52,49	37,06	14,10	43,16	29,01
Riau	13,39	52,51	32,35	16,73	57,27	36,38	14,26	50,88	32,01
Jambi	13,83	50,90	31,98	17,08	58,45	37,34	14,50	52,65	33,18
Sumatera Selatan	15,27	41,24	28,08	17,64	49,80	33,50	15,58	45,94	30,55
Bengkulu	13,42	41,36	27,11	17,72	48,25	32,68	14,30	40,95	27,36
Lampung	12,93	45,47	28,71	16,34	55,42	35,30	11,41	48,50	29,41
Kep. Bangka Belitung	12,43	50,76	30,76	14,18	57,04	34,68	12,76	53,07	32,03
Kepulauan Riau	12,99	47,67	29,90	14,45	55,40	34,42	13,24	51,97	32,12
DKI Jakarta	15,47	45,86	30,51	15,87	48,28	31,91	14,46	47,12	30,63
Jawa Barat	14,06	55,96	34,73	16,32	58,22	36,99	14,04	56,58	35,02
Jawa Tengah	14,77	43,00	29,14	15,79	42,28	29,28	13,93	41,57	28,00
DI Yogyakarta	20,85	38,71	29,98	22,47	39,36	31,11	20,38	35,95	28,35
Jawa Timur	15,50	44,79	30,51	14,98	44,44	30,08	14,79	44,45	29,99
Banten	13,00	51,37	31,81	16,97	56,74	36,47	14,42	52,23	32,95
Bali	15,05	28,87	21,97	16,12	33,17	24,65	14,67	29,46	22,07
Nusa Tenggara Barat	15,29	44,15	30,51	19,43	48,12	34,56	16,70	47,68	33,03
Nusa Tenggara Timur	15,83	38,86	27,66	19,28	42,65	31,28	17,31	37,33	27,59
Kalimantan Barat	13,37	41,54	27,16	16,27	44,81	30,25	13,62	39,82	26,45
Kalimantan Tengah	13,76	45,85	29,01	14,33	51,06	31,79	12,67	43,95	27,54
Kalimantan Selatan	13,18	45,12	29,07	14,71	47,28	30,92	10,59	44,10	27,27
Kalimantan Timur	9,33	52,29	29,46	15,19	60,05	36,21	13,05	52,97	31,76
Sulawesi Utara	15,42	54,77	34,77	18,66	62,55	40,24	13,99	54,09	33,71
Sulawesi Tengah	12,43	47,24	29,43	14,88	54,17	34,08	13,93	45,94	29,56
Sulawesi Selatan	17,17	52,56	35,69	19,53	57,73	39,51	17,24	57,15	38,12
Sulawesi Tenggara	15,41	44,49	30,08	18,15	49,97	34,21	15,70	44,13	30,04
Gorontalo	14,35	49,68	32,12	18,04	57,74	38,00	16,80	48,71	32,86
Sulawesi Barat	13,99	38,07	26,16	16,56	49,44	33,18	14,93	42,45	28,84
Maluku	19,55	46,14	32,87	22,22	53,11	37,69	19,36	44,34	31,87
Maluku Utara	16,47	50,34	33,06	17,71	54,28	35,62	16,58	51,71	33,79
Papua Barat	18,93	46,48	31,74	19,86	49,33	33,59	18,42	47,19	31,80
Papua	12,68	29,39	20,55	13,39	31,66	21,99	13,73	28,46	20,67
<b>Indonesia</b>	<b>14,69</b>	<b>46,74</b>	<b>30,74</b>	<b>16,42</b>	<b>49,72</b>	<b>33,10</b>	<b>14,51</b>	<b>47,07</b>	<b>30,81</b>

## Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November	Mei	Agustus	November
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	56,84	55,14	56,15	30,18	31,57	31,20	12,98	13,30	12,65
Sumatera Utara	58,79	57,28	58,13	32,19	34,16	33,10	9,02	8,56	8,77
Sumatera Barat	59,35	59,70	58,99	28,95	28,26	28,47	11,71	12,04	12,54
Riau	57,80	59,13	55,04	31,06	30,33	33,48	11,15	10,54	11,47
Jambi	63,01	63,07	62,47	25,87	25,85	25,56	11,12	11,08	11,97
Sumatera Selatan	67,96	65,11	65,46	24,24	24,64	26,30	7,80	10,25	8,24
Bengkulu	63,88	60,69	62,43	26,55	28,16	27,78	9,56	11,15	9,79
Lampung	69,37	67,32	67,51	23,98	24,46	24,86	6,64	8,21	7,64
Kep. Bangka Belitung	66,10	65,35	64,94	26,47	25,72	27,24	7,43	8,92	7,82
Kepulauan Riau	46,41	40,40	50,31	39,33	47,50	33,90	14,26	12,09	15,79
DKI Jakarta	32,70	34,57	33,17	44,09	46,24	43,03	23,21	19,19	23,79
Jawa Barat	66,23	66,75	65,44	25,40	25,11	26,12	8,37	8,13	8,44
Jawa Tengah	72,67	72,72	72,75	20,53	20,52	20,57	6,79	6,76	6,68
DI Yogyakarta	48,84	51,48	46,93	32,76	34,08	36,33	18,40	14,44	16,74
Jawa Timur	69,48	70,46	68,63	21,76	22,56	22,67	8,77	6,98	8,70
Banten	58,18	57,16	55,03	28,80	32,01	31,76	13,03	10,83	13,21
Bali	56,76	53,22	56,62	30,02	32,47	31,01	13,21	14,32	12,36
Nusa Tenggara Barat	69,54	69,43	67,54	21,65	20,04	23,91	8,82	10,53	8,55
Nusa Tenggara Timur	79,02	75,29	77,09	14,62	17,18	15,80	6,37	7,53	7,11
Kalimantan Barat	73,74	72,87	73,70	18,93	20,24	18,57	7,32	6,90	7,72
Kalimantan Tengah	70,31	68,29	66,85	20,17	22,71	23,54	9,52	9,00	9,61
Kalimantan Selatan	73,53	70,27	71,17	18,43	20,83	19,91	8,03	8,90	8,92
Kalimantan Timur	49,55	51,17	49,62	37,30	36,52	37,57	13,15	12,31	12,81
Sulawesi Utara	59,32	54,60	57,72	30,53	33,28	31,08	10,15	12,12	11,20
Sulawesi Tengah	65,62	64,26	64,08	23,27	24,31	25,42	11,11	11,43	10,50
Sulawesi Selatan	63,22	60,28	60,61	23,70	25,34	25,59	13,08	14,38	13,80
Sulawesi Tenggara	61,23	59,57	59,35	23,79	27,11	26,59	14,98	13,32	14,05
Gorontalo	71,14	70,60	70,23	17,91	19,24	17,11	10,95	10,16	12,66
Sulawesi Barat	74,16	70,04	70,90	18,89	19,98	20,84	6,95	9,98	8,25
Maluku	58,76	53,64	61,19	29,77	32,46	26,37	11,46	13,90	12,43
Maluku Utara	58,12	60,89	60,33	29,38	27,16	25,80	12,49	11,95	13,87
Papua Barat	58,13	56,22	58,65	30,29	30,29	27,44	11,58	13,48	13,92
Papua	74,86	74,59	75,38	18,06	18,58	17,32	7,08	6,83	7,30
<b>Indonesia</b>	<b>64,64</b>	<b>64,35</b>	<b>63,74</b>	<b>25,47</b>	<b>26,24</b>	<b>26,25</b>	<b>9,89</b>	<b>9,41</b>	<b>10,01</b>

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2013 (rupiah)

Lapangan Usaha	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 258 239	807 286	1 167 033	1 350 249	829 269	1 235 765	1 397 218	930 620	1 301 564
2	3 411 985	2 254 436	3 352 590	3 291 086	2 296 194	3 242 802	3 254 976	2 593 938	3 219 578
3	1 573 564	1 131 296	1 409 098	1 899 128	1 399 547	1 716 855	1 873 564	1 253 368	1 649 533
4	2 037 438	1 910 238	2 023 159	2 303 102	3 310 202	2 439 168	2 405 040	1 693 540	2 314 383
5	1 549 833	1 904 571	1 567 812	1 681 146	2 445 661	1 713 530	1 738 292	1 961 145	1 744 684
6	1 335 010	1 092 290	1 238 419	1 728 852	1 332 873	1 574 857	1 666 315	1 336 527	1 539 100
7	1 862 926	2 352 235	1 917 813	2 218 892	2 158 125	2 211 943	2 315 568	2 380 655	2 322 747
8	2 445 601	2 551 147	2 475 160	2 732 450	2 692 313	2 721 417	2 906 933	2 695 208	2 842 362
9	2 174 136	1 593 628	1 890 972	2 449 516	1 787 316	2 141 817	2 514 327	1 782 404	2 162 976
<b>Total</b>	<b>1 812 606</b>	<b>1 427 717</b>	<b>1 675 728</b>	<b>2 061 258</b>	<b>1 615 889</b>	<b>1 909 478</b>	<b>2 101 449</b>	<b>1 601 053</b>	<b>1 927 321</b>

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai  
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2013  
(rupiah)

Lapangan Usaha	Mei			Agustus			November		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 313 360	1 118 263	1 167 033	1 379 607	1 188 800	1 235 765	1 547 255	1 221 679	1 301 564
2	4 566 537	1 893 876	3 352 590	4 303 694	2 269 808	3 242 802	4 106 058	2 175 318	3 219 578
3	1 494 213	1 184 638	1 409 098	1 856 077	1 259 522	1 716 855	1 790 813	1 267 344	1 649 533
4	2 166 631	1 586 108	2 023 159	2 663 851	1 758 009	2 439 168	2 711 198	1 441 688	2 314 383
5	1 704 107	1 314 547	1 567 812	1 865 817	1 378 042	1 713 530	1 928 902	1 425 373	1 744 684
6	1 301 146	988 235	1 238 419	1 688 481	1 043 733	1 574 857	1 656 074	1 080 512	1 539 100
7	2 058 066	1 473 999	1 917 813	2 386 285	1 643 005	2 211 943	2 555 397	1 590 443	2 322 747
8	2 645 975	1 489 014	2 475 160	2 888 555	1 617 011	2 721 417	3 046 878	1 720 007	2 842 362
9	1 993 455	1 654 461	1 890 972	2 293 105	1 785 458	2 141 817	2 352 258	1 718 257	2 162 976
<b>Total</b>	<b>1 816 131</b>	<b>1 363 511</b>	<b>1 675 728</b>	<b>2 090 970</b>	<b>1 466 071</b>	<b>1 909 478</b>	<b>2 137 771</b>	<b>1 454 909</b>	<b>1 927 321</b>

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013  
(rupiah)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 721 586	1 561 722	1 667 122	1 751 607	1 703 862	1 735 483	1 682 828	2 084 387	1 815 954
Sumatera Utara	1 683 992	1 370 481	1 582 867	1 793 776	1 451 899	1 686 067	1 748 596	1 616 109	1 704 956
Sumatera Barat	1 869 826	1 688 917	1 798 587	1 920 849	1 692 604	1 835 055	2 033 273	1 687 698	1 891 951
Riau	2 040 777	1 651 277	1 930 449	2 190 378	1 740 307	2 065 287	2 170 584	1 739 622	2 040 458
Jambi	1 605 930	1 354 329	1 523 987	1 852 875	1 683 679	1 800 359	2 002 287	1 483 655	1 836 576
Sumatera Selatan	1 672 382	1 425 138	1 588 915	1 866 000	1 655 342	1 794 051	1 743 243	1 491 749	1 662 331
Bengkulu	1 824 821	1 542 073	1 710 124	1 969 047	1 599 817	1 834 371	2 067 059	1 597 187	1 881 376
Lampung	1 378 498	1 174 680	1 310 680	1 688 471	1 500 445	1 627 461	1 557 851	1 370 420	1 490 618
Kep. Bangka Belitung	1 841 003	1 366 912	1 690 144	2 053 954	1 588 584	1 918 126	1 985 917	1 576 599	1 856 901
Kepulauan Riau	2 581 243	2 028 155	2 388 768	3 672 019	2 371 562	3 274 805	2 662 429	2 446 174	2 594 153
DKI Jakarta	2 488 387	1 940 330	2 269 805	3 096 107	2 423 146	2 856 675	3 350 539	2 586 592	3 062 407
Jawa Barat	1 781 577	1 463 029	1 677 134	1 982 872	1 678 678	1 888 843	2 060 079	1 508 599	1 894 415
Jawa Tengah	1 481 844	1 073 212	1 320 408	1 518 812	1 100 906	1 353 704	1 556 296	1 095 126	1 371 068
DI Yogyakarta	1 696 578	1 342 207	1 552 869	1 834 705	1 415 381	1 658 721	1 795 722	1 415 987	1 633 561
Jawa Timur	1 514 254	1 120 830	1 360 710	1 661 270	1 265 649	1 516 254	1 711 238	1 271 789	1 544 051
Banten	2 102 935	1 644 908	1 948 570	2 511 979	2 048 995	2 360 641	2 881 400	2 109 605	2 619 634
Bali	1 792 815	1 499 250	1 670 532	2 038 442	1 569 031	1 859 716	2 025 158	1 590 740	1 855 007
Nusa Tenggara Barat	1 699 186	1 217 386	1 527 361	2 009 024	1 409 882	1 781 554	1 870 421	1 282 346	1 643 664
Nusa Tenggara Timur	1 683 815	1 570 795	1 648 004	1 858 580	1 646 424	1 786 966	1 768 604	1 653 442	1 731 045
Kalimantan Barat	1 672 250	1 376 683	1 594 157	2 055 402	1 651 262	1 939 928	1 859 493	1 526 279	1 769 071
Kalimantan Tengah	1 933 376	1 722 371	1 874 832	2 155 888	1 814 449	2 061 451	2 240 872	1 748 814	2 097 085
Kalimantan Selatan	1 871 173	1 467 033	1 761 138	2 297 911	1 675 601	2 112 199	2 459 677	1 632 618	2 219 740
Kalimantan Timur	2 528 139	1 827 726	2 329 342	3 023 017	2 040 307	2 772 880	3 089 338	2 255 809	2 861 450
Sulawesi Utara	1 838 230	1 887 826	1 855 313	2 099 344	2 174 179	2 124 218	2 093 654	2 160 072	2 115 827
Sulawesi Tengah	1 820 609	1 462 422	1 688 217	1 986 559	1 637 227	1 859 472	2 040 670	1 517 033	1 847 142
Sulawesi Selatan	1 853 121	1 506 634	1 714 806	2 074 187	1 707 447	1 937 647	1 969 983	1 473 165	1 782 992
Sulawesi Tenggara	1 940 290	1 604 705	1 812 724	2 073 591	1 729 575	1 958 091	2 220 910	1 628 466	2 003 185
Gorontalo	1 587 586	1 440 142	1 521 062	1 750 506	1 548 936	1 664 495	1 795 042	1 677 091	1 741 460
Sulawesi Barat	1 639 090	1 287 804	1 506 044	2 247 377	1 627 116	2 033 627	1 639 734	1 222 280	1 497 678
Maluku	1 965 922	1 850 802	1 922 408	2 467 005	1 975 053	2 288 089	2 229 107	1 791 707	2 068 914
Maluku Utara	2 054 800	1 845 914	1 987 443	2 288 529	1 853 495	2 145 553	1 964 425	2 197 937	2 034 146
Papua Barat	2 229 065	2 086 462	2 187 580	2 905 906	2 214 957	2 706 309	2 801 305	2 376 345	2 678 318
Papua	2 761 875	2 034 281	2 569 276	3 266 618	2 578 394	3 099 568	3 160 868	2 464 012	2 984 020
<b>Indonesia</b>	<b>1 812 606</b>	<b>1 427 717</b>	<b>1 675 728</b>	<b>2 061 258</b>	<b>1 615 889</b>	<b>1 909 478</b>	<b>2 101 449</b>	<b>1 601 053</b>	<b>1 927 321</b>

Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah,  
2013  
(rupiah)

Provinsi	Mei			Agustus			November		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 881 611	1 506 600	1 667 122	2 102 313	1 472 515	1 735 483	2 280 629	1 500 673	1 815 954
Sumatera Utara	1 641 670	1 455 462	1 582 867	1 782 582	1 485 638	1 686 067	1 829 036	1 427 643	1 704 956
Sumatera Barat	1 948 541	1 600 575	1 798 587	2 016 737	1 608 951	1 835 055	2 131 850	1 598 295	1 891 951
Riau	2 212 899	1 623 097	1 930 449	2 404 037	1 701 274	2 065 287	2 284 111	1 757 024	2 040 458
Jambi	1 740 710	1 387 997	1 523 987	2 247 316	1 468 344	1 800 359	2 227 389	1 605 954	1 836 576
Sumatera Selatan	1 791 468	1 331 237	1 588 915	2 159 326	1 305 207	1 794 051	1 819 624	1 483 320	1 662 331
Bengkulu	1 966 980	1 465 598	1 710 124	2 118 496	1 549 819	1 834 371	2 340 185	1 394 921	1 881 376
Lampung	1 548 144	1 150 669	1 310 680	2 007 911	1 301 914	1 627 461	1 820 632	1 257 672	1 490 618
Kep. Bangka Belitung	1 774 341	1 575 194	1 690 144	2 063 513	1 700 602	1 918 126	1 921 215	1 771 308	1 856 901
Kepulauan Riau	2 426 934	1 964 347	2 388 768	3 407 441	1 791 214	3 274 805	2 614 680	2 388 056	2 594 153
DKI Jakarta	2 269 805	-	2 269 805	2 856 675	-	2 856 675	3 062 407	-	3 062 407
Jawa Barat	1 778 524	1 256 841	1 677 134	1 999 992	1 359 514	1 888 843	2 023 070	1 343 173	1 894 415
Jawa Tengah	1 406 166	1 180 811	1 320 408	1 436 706	1 202 136	1 353 704	1 501 702	1 149 938	1 371 068
DI Yogyakarta	1 593 471	1 411 489	1 552 869	1 731 142	1 370 730	1 658 721	1 663 784	1 532 922	1 633 561
Jawa Timur	1 474 541	1 138 277	1 360 710	1 650 668	1 207 643	1 516 254	1 724 348	1 188 552	1 544 051
Banten	2 073 061	1 328 591	1 948 570	2 487 845	1 596 000	2 360 641	2 818 996	1 561 060	2 619 634
Bali	1 743 661	1 473 950	1 670 532	1 960 657	1 567 333	1 859 716	1 961 869	1 561 263	1 855 007
Nusa Tenggara Barat	1 667 142	1 340 715	1 527 361	1 945 385	1 501 874	1 781 554	1 816 432	1 374 046	1 643 664
Nusa Tenggara Timur	1 855 287	1 484 419	1 648 004	2 175 654	1 446 268	1 786 966	2 077 781	1 452 215	1 731 045
Kalimantan Barat	1 748 399	1 453 760	1 594 157	2 138 443	1 723 745	1 939 928	1 983 654	1 563 455	1 769 071
Kalimantan Tengah	2 163 974	1 657 170	1 874 832	2 220 556	1 939 077	2 061 451	2 340 065	1 937 123	2 097 085
Kalimantan Selatan	1 830 686	1 677 057	1 761 138	2 142 994	2 071 288	2 112 199	2 173 988	2 284 796	2 219 740
Kalimantan Timur	2 435 458	2 021 478	2 329 342	3 031 467	2 159 044	2 772 880	2 943 696	2 639 937	2 861 450
Sulawesi Utara	1 957 389	1 689 790	1 855 313	2 254 673	1 887 453	2 124 218	2 211 823	1 961 790	2 115 827
Sulawesi Tengah	1 862 157	1 546 814	1 688 217	2 205 159	1 514 453	1 859 472	2 408 636	1 468 644	1 847 142
Sulawesi Selatan	1 976 668	1 398 487	1 714 806	2 223 703	1 510 891	1 937 647	2 083 466	1 411 871	1 782 992
Sulawesi Tenggara	2 048 773	1 589 701	1 812 724	2 274 800	1 705 112	1 958 091	2 156 252	1 850 281	2 003 185
Gorontalo	1 710 531	1 271 377	1 521 062	1 962 017	1 329 398	1 664 495	2 088 340	1 350 180	1 741 460
Sulawesi Barat	1 618 882	1 420 151	1 506 044	2 020 865	2 041 431	2 033 627	1 910 369	1 205 014	1 497 678
Maluku	2 034 067	1 750 390	1 922 408	2 649 234	1 684 024	2 288 089	2 306 601	1 703 269	2 068 914
Maluku Utara	2 229 255	1 799 872	1 987 443	2 260 095	2 044 843	2 145 553	2 096 186	1 981 090	2 034 146
Papua Barat	2 360 445	2 042 770	2 187 580	2 662 535	2 738 101	2 706 309	2 569 482	2 776 041	2 678 318
Papua	2 661 373	2 421 548	2 569 276	3 290 834	2 732 185	3 099 568	3 306 716	2 380 628	2 984 020
<b>Indonesia</b>	<b>1 816 131</b>	<b>1 363 511</b>	<b>1 675 728</b>	<b>2 090 970</b>	<b>1 466 071</b>	<b>1 909 478</b>	<b>2 137 771</b>	<b>1 454 909</b>	<b>1 927 321</b>



Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

## Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal

INF = Informal

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)